

Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A.



EKOLOGI PEMERINTAHAN

EKOLOGI PEMERINTAHAN

Penulis : Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A.

ISBN : 978-623-329-242-9

Copyright © Januari 2021

Ukuran: 15.5 cm X 23 cm; Hal: x + 60

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Penata Isi : M. Rosyiful Aqli

Desainer Sampul : Ahmad Ariyanto

Cetakan I, Januari 2021

Diterbitkan pertama kali oleh **Literasi Nusantara**

Perum Paradiso Kav. A1 Junrejo-Batu

Telp : +6285887254603, +6285841411519

Email: penerbitlitnus@gmail.com

Web: www.penerbitlitnus.co.id

Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018

Didistribusikan oleh CV. Literasi Nusantara Abadi

Jl. Sumedang No. 319, Cepokomulyo, Kepanjen, Malang. 65163

Telp : +6282233992061

Email: redaksiliterasinusantara@gmail.com

LEMBAR PENGESAHAN

Buku Ajar : Ekologi Pemerintahan
Mata Kuliah : Ekologi Pemerintahan
Kode Mata Kuliah / SKS : PEM620107
NIP /NIDN : 197804302005011002/ 0030047802
Program Studi /Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui

Ketua Jurusan

Penulis

Drs.R. Sigit Krisbintoro, M.IP
NIP 196112181989021001

Dr. Robi Cahyadi Kurniawan
NIP. 197804302005011002

Mengesahkan

Ketua LP3M UNILA

Mengetahui

Dekan FISIP UNILA

Prof. Dr. Ir Wan Abbas Zakaria M.S
NIP 196108261987021001

Dra. Ida Nurhaida, M.Si
NIP 196108071987032001

LEMBAR PERSETUJUAN *PEER GROUP*

Judul Buku Ajar : Ekologi Pemerintahan
Nama Penulis : Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A
NIP /NIDN : 197804302005011002 / 0030047802
Program Studi / Jurusan : Ilmu Pemerintahan

MENYETUJUI

Peer Group Bidang Politik

Ketua *Peer Group*

Anggota

Dr Tabah Maryanah
NIP 197106042003122001

Drs. R Sigit Krisbintoro, M.IP
NIP 196112181989021001

KATA PENGANTAR

Buku ajar ini merupakan kumpulan bahan kuliah Ekologi Pemerintahan pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis menjadi pengampu mata kuliah ini sejak menyelesaikan studi doktoral pada tahun 2018 silam.

Buku ajar khusus mata kuliah Ekologi Pemerintahan belum ada di Jurusan Ilmu Pemerintahan, sehingga menggugah penulis untuk menyusun dan menyatukan kepingan-kepingan materi perkuliahan menjadi sebuah bahan ajar yang berbentuk buku, hal ini untuk mempermudah mahasiswa memahami dan mempelajari materi perkuliahan dengan lebih sistematis.

Buku ajar ini selain berisi materi, juga dilengkapi dengan rangkuman serta tugas dan juga bagan atau tabel dan gambar guna mempermudah dalam membaca dan memahami.

Tentu saja, masih banyak kekurangan didalam penulisan buku ajar ini, menjadi motivasi penulis untuk memperbaiki dan memperdalam kajian di masa yang akan datang. Harapan penulis semoga dapat memberikan manfaat yang baik bagi jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP dan Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 20 Desember 2020
Penulis

Robi Cahyadi Kurniawan

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	iii
Lembar Persetujuan <i>Peer Group</i>	v
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	x
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Tabel	xii

BAB I.

KONSEP DASAR EKOLOGI PEMERINTAHAN.....	1
1.1 Pendahuluan	1
1.2 Penyajian	3
1.2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Ekologi	3
1.2.2 Konsep Ekosistem.....	7
1.2.3 Konsep Ekologi Pemerintahan	8
1.3 Rangkuman	22
1.4 Latihan/Tugas/Eksperimen	22
1.5 Rujukan	22

BAB II.

KONSEP SISTEM PEMERINTAHAN	23
2.1 Pendahuluan	23
2.2 Penyajian	24
2.2.1 Konsep Sistem Pemerintahan.....	24
2.3 Rangkuman	31
2.4 Latihan/Tugas/Eksperimen	31
2.5 Rujukan	32

BAB III.

KONSEP GOOD GOVERNANCE.....33

3.1 Pendahuluan 33

 3.1.1. Pengertian Pemerintahan yang baik..... 34

 3.1.2. Teori konsep good governance 37

 3.1.3. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik 39

 3.1.4. Karakteristik good governance..... 40

 3.1.5. Pilar Good Governance 42

 3.1.6. Konsep Pelayanan Publik 45

3.2 Rangkuman 46

3.3 Tugas/Latihan/Eksperimen 47

3.4 Rujukan 47

BAB IV.

**MEMBANGUN PEMERINTAH YANG EKOLOGIS DAN
BERKELANJUTAN SEBAGAI WUJUD DARI**

GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE.....49

4.1 Pendahuluan 49

4.2 Penyajian 52

 4.2.1 Pembangunan Berkelanjutan dilihat
 dari Aspek Ekologis..... 50

 4.2.2 Menumbuhkan kecerdasan Ekologis 55

4.3 Rangkuman 58

4.4 Tugas/Latihan/Eksperimen 58

4.5 Rujukan 59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Pengertian ruang lingkup ekologi	3
Gambar 1.2	Hubungan ekologi dengan ilmu lainnya	5
Gambar 1.3	Ilmu lingkungan (bentuk persegi) dan dinamika interaksi dalam ekologi (garis putus-putus)	7
Gambar 1.4	Ekosistem.....	10
Gambar 1.5	latar belakang ekologi pemerintahan dari sudut pandang ilmu pemerintahan	16
Gambar 1.6	Skema panca gatra pengaruh sosial	21
Gambar 2.1.	Sistem Pemerintahan Parlementer	34
Gambar 2.2	Sistem Pemerintahan Presidensial	36
Gambar 3.1	Prinsip Good Governance.....	56
Gambar 4.1	Pilar Pembangunan Berkelanjutan.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Perbedaan governance dan government.....	36
------------	--	----

BAB I.

KONSEP DASAR EKOLOGI PEMERINTAHAN

1.1 Pendahuluan

Lingkungan hidup merupakan keadaan sekitar yang melingkupi atau mengelilingi suatu organisme hidup atau suatu kehidupan. Riggs (1990) menyatakan bahwa lingkungan “sesuatu” adalah berbeda dengan lingkungan yang lainnya. Karenanya, tanpa mengidentifikasi sesuatu yang dilingkupi (*enviromed*), maka lingkungan tidak dapat didefinisikan atau ditetapkan secara tegas. Keterkaitan antara lingkungan dan *enviromedi* diungkapkan dalam konsep ekologi.

Ekologi juga dapat di definisikan ilmu mengenai hubungan timbal balik antara organisme-organisme hidup dengan lingkungannya. Titiik pusat ekologi adalah ekosistem, yakni sistem ekologi terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya dan suatu tempat di mana makhluk hidup maupun tak hidup saling berinteraksi satu sama lain, yang disebut ekosistem. Masing-masing komponen yang ada memiliki fungsinya masing-masing. Selama komponen tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik, maka ekosistem tersebut berada dalam suatu keseimbangan.

Buku ajar ini akan menjelaskan tentang konsep ekologi pemerintahan. Secara lengkap buku ajar pada bab 1 ini menjelaskan tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Pengertian, sejarah ekologi
2. Kedudukan ilmu ekologi dan perkembangannya, serta hubungannya dengan ilmu yang lain.
3. Konsep ekosistem secara garis besar
4. Konsep dan ruang lingkup kajian ekologi pemerintahan
5. Pnca gatra dan Tri gatra ekologi pemerintahan

Setelah mempelajari buku ajar ekologi pemerintahan ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Memahami konsep ekologi pemerintahan
2. Memahami konsep ekosistem dalam ekologi

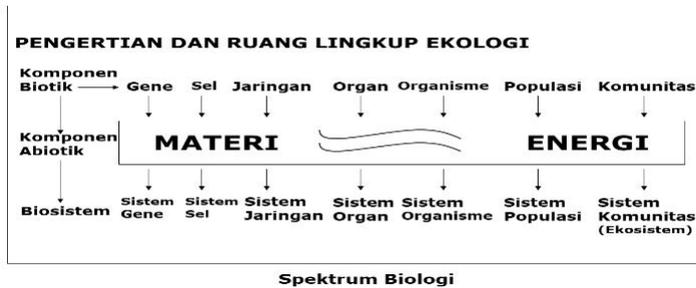
1.2 Penyajian

1.2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Ekologi

1. Definisi Ekologi

Ekologi dikenal sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Makhluk hidup dalam kasus pertanian adalah tanaman, sedangkan lingkungannya dapat berupa air, tanah, unsur hara, dan lain-lain. Kata ekologi berasal dari bahasa Yunani *oikos*, yang berarti "rumah" atau "tempat untuk hidup", dan "*logos*" yang berarti ilmu, sehingga ekologi berarti ilmu yang mengkaji interaksi antar makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya.

Ekologi juga dapat didefinisikan sebagai pengkajian hubungan organisme-organisme atau kelompok organisme terhadap lingkungannya, atau ilmu hubungan timbal balik antara organisme-organisme hidup dengan lingkungannya (Odum, 1996). Saat ini ekologi lebih dikenal sebagai "ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi dari alam". Bahkan ekologi dikenal sebagai ilmu yang mempelajari rumah tangga makhluk hidup.



Gambar 1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Ekologi

Sumber : <https://koncosharing.blogspot.com/2018/11/ekologi-dan-ruang-lingkup.html>

Secara harfiah ekologi adalah ilmu tentang makhluk hidup dalam rumahnya, atau dapat diartikan juga sebagai ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup. Ekologi adalah studi tentang “kehidupan di rumah” dengan penekanan pada “keseluruhan atau pola hubungan antara organisme dan lingkungannya”. Anonim (2018) menyebutkan bahwa “*within the discipline of ecology, researchers work at five broad levels, sometimes discretely and sometimes with overlap: organism, population, community, ecosystem, and biosphere*”. Melihat substansi dari ekologi sebagai ilmu pengetahuan, maka dikatakan juga bahwa, organisasi negara dapat dipandang sebagai ekologi dalam mengatur rumah tangga negara melalui pelaksanaan pemerintahan.

Menurut Syafiie (2019 : 2-3) terdapat berbagai pendapat yang memberikan pendefinisian tentang ekologi, yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut Edward S. Rogers ekologi adalah pelajaran tentang hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitar mereka.
- b. Menurut J.W. Bews (1935) (ekologi) adalah berasal dari Bahasa Yunani, “Oikos” suatu rumah tangga atau tempat tinggal, sama dengan akar kata dari ekonomi dan ilmu ekonomi, Ekonomi adalah suatu subyek yang biasa berkenaan dengan ekologi, tetapi ekologi lebih luas jangkauannya, hal tersebut berkenaan dengan seluruh antar hubungan dari makhluk hidup dengan lingkungan sekitar mereka.

- c. Menurut Prajudi Atmosudirdjo Ekologi adalah suatu tata hubungan total (menyeluruh) dan mutual (timbang balik yang berguna) antara suatu organisme dengan lingkungan sekitarnya.
- d. Menurut Komarudin (1994) Ekologi adalah suatu kajian yang berhubungan dengan antar relasi antara organisme dengan lingkungan, dasar empirisnya terletak pada hasil penelitian bahwa organisme yang hidup itu bervariasi menurut lingkungannya .

Ekologi dapat dibagi menjadi tiga pokok bahasan, antara lain:

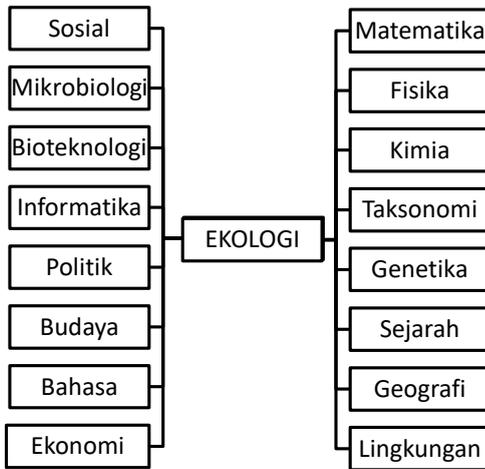
- a. Tingkat-tingkat organisasi (ekosistem, komunitas, populasi, dan organisme)
- b. Jenis lingkungan atau habitatnya
- c. Penerapan-penerapan asas dasar ekologi.

Ekologi memiliki sistem dalam kompleksitas penyusunan yang saling terkait dan membentuk proses ekologi. *Proses Ekologi* adalah berlangsungnya proses hubungan antara organisme dan lingkungannya. Banyak proses yang terjadi selama berlangsungnya hubungan tersebut mulai dari proses untuk mempertahankan diri, proses berkembang-biak, proses penyesuaian diri, dan sebagainya.

2. Kaitan Ekologi dengan Ilmu Pengetahuan Lain

Ekologi adalah ilmu yang banyak memanfaatkan informasi dari berbagai ilmu pengetahuan lain, seperti : kimia, fisika, geologi, dan klimatologi untuk pembahasannya. Penerapan ekologi di bidang pertanian dan perkebunan di antaranya adalah penggunaan kontrol biologi untuk pengendalian populasi hama guna meningkatkan produktivitas. Ekologi berkepentingan dalam menyelidiki interaksi organisme dengan lingkungannya. Pengamatan ini bertujuan untuk menemukan prinsip-prinsip yang terkandung dalam hubungan timbal balik tersebut.

Beberapa ilmu yang berhubungan dengan ekologi, diantaranya:



Gambar 1.2 Hubungan ekologi dengan ilmu lainnya

Menurut E.H. Haeckel (1869), ekologi adalah studi tentang berbagai keterkaitan organisme-organisme sesamanya serta dengan segala aspek lingkungannya baik yang hidup maupun yang tidak hidup. Definisi ini sekaligus memberikan batasan pada ruang lingkup ekologi yang memiliki persamaan sekaligus perbedaan dengan ilmu-ilmu lingkungan. Persamaan keduanya terletak pada aspek-aspek lingkungan yang dipelajari, sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan. Ilmu lingkungan mempelajari aspek-aspek lingkungan secara terpisah, sedangkan ekologi mempelajarinya sebagai satu sistem dinamik sekaligus mencermati faktor-faktor lingkungan kehidupan manusia lainnya, seperti lingkungan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Berdasarkan bidang kajiannya, ekologi dapat dibagi menjadi autoekologi dan sinekologi.

a. Autekologi

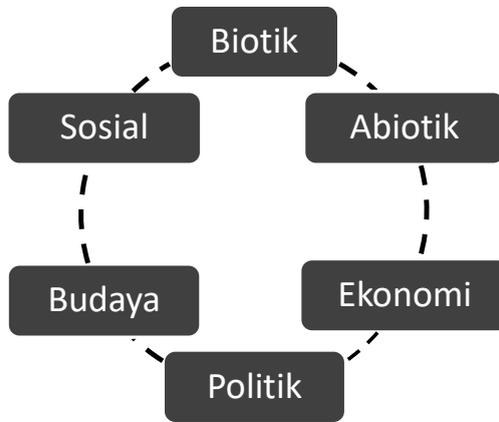
Membahas pengkajian individu organisme atau individu spesies yang penekanannya pada sejarah hidup dan kelakuan dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan.

Contoh : Bila diadakan suatu studi mengenai suatu jenis pohon tersebut terhadap lingkungan, maka pengkajian itu akan bersifat autekologi.

b. Sinekologi

Sinekologi mengkaji hubungan antar kumpulan organisme sebagai satu satuan. Misalnya, kajian mengenai distribusi bakau menurut karakteristik abiotik dan pertumbuhan bakau termasuk ke dalam autoekologi, namun demikian tidak menutup kemungkinan untuk mengkaji komponen lingkungan lainnya yang berkaitan dengan bakau. Kajian sinekologi mengkaji keseluruhan ekologi tempat hidup bakau, misalnya efektifitas bakau dalam memecah gelombang. Dengan demikian, sinekologi membahas pengkajian golongan atau kumpulan-kumpulan organism-organisme yang berasosiasi bersama sebagai satuan

Contoh : Apabila studi itu memperhatikan atau mengenai hutan dimana pohon itu tumbuh , maka pendekatannya bersifat sinekologi.



Gambar 1.3 Ilmu lingkungan (bentuk persegi) dan dinamika interaksi dalam ekologi (garis putus-putus).

Sumber : (Wirakusumah, 2003)

Berdasarkan gambar di atas, terjadinya interaksi ekologi yang dinamis di antara komponen-komponen lingkungan didalamnya mengubah jumlah dan mutu lingkungan. Proses ekologi ini mengakibatkan upaya kelestarian lingkungan berpusat pada keseimbangan lingkungan, yakni adanya keberlanjutan

interaksi antar komponen walaupun mengalami perubahan struktur dan fungsi. Ini menunjukkan bahwa ekologi tidak hanya membahas interaksi semata, tetapi juga dinamika komponen-komponen yang berinteraksi.

1.2.2 Konsep Ekosistem

Ekologi sebagai pendekatan, titik pusat ekologi adalah ekosistem, yakni sistem ekologi terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya dan suatu tempat di mana makhluk hidup maupun tak hidup saling berinteraksi satu sama lain, yang disebut ekosistem. Di dalam ekosistem, organisme yang ada selalu berinteraksi secara timbal balik dengan lingkungannya. Interaksi timbal balik tersebut membentuk suatu sistem yang kemudian dikenal sebagai ekologi atau ekosistem.

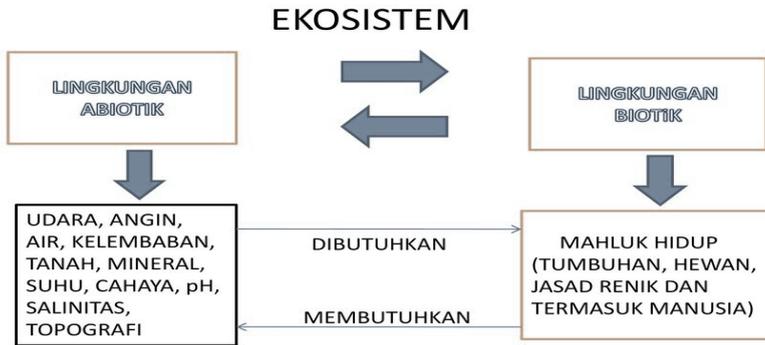
Dengan hal tersebut, ekosistem merupakan suatu satuan fungsional dasar yang menyangkut proses interaksi organisme biotik atau makhluk hidup dengan lingkungannya. Lingkungan yang dimaksud dapat berupa lingkungan biotik (makhluk hidup) maupun abiotik (non makhluk hidup). Sebagai suatu sistem, di dalam suatu ekosistem selalu dijumpai proses interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, antara lain dapat berupa adanya aliran energi, rantai makanan, siklus biogeokimia, perkembangan, dan pengendalian.

Ekosistem juga dapat didefinisikan sebagai suatu satuan lingkungan yang melibatkan unsur-unsur biotik (jenis-jenis makhluk) dan faktor-faktor fisik (iklim, air, dan tanah) serta kimia (keasaman dan salinitas) yang saling berinteraksi satu sama lain. Wujud yang dapat digunakan sebagai ciri keutuhan ekosistem adalah energetika (taraf trofi atau makanan, produsen, konsumen, dan redusen), pendauran hara (peran pelaksana taraf trofi), dan produktivitas (hasil keseluruhan).

Proses perkembangan konsep ekosistem, berbagai konsep ekosistem pada dasarnya sudah mulai dirintis oleh beberapa pakar ekologi. Pada tahun 1877, Karl Möbius (Jerman) menggunakan istilah biocoenosis. Kemudian pada tahun 1887, S.A. Forbes (Amerika) menggunakan istilah mikrokosmos. Di Rusia pada mulanya lebih

banyak digunakan istilah biocoenosis, ataupun geobiocoenosis. Istilah ekosistem mula-mula diperkenalkan oleh seorang pakar ekologi dari Inggris, A.G.Tansley, pada tahun 1935. Pada akhirnya istilah ekosistem lebih banyak digunakan dan dapat diterima secara luas sampai sekarang.

Konsep ekosistem merupakan konsep yang luas, fungsi utamanya di dalam pemikiran atau pandangan ekologi merupakan penekanan hubungan wajib, ketergantungan, dan hubungan sebab akibat, yaitu perangkaian komponen-komponen untuk membentuk satuan-satuan fungsional. Ekosistem merupakan tingkat organisasi biologi yang paling baik untuk teknik-teknik analisis sistem (Odum, 1996). Berikut disajikan bagan dari ekosistem :



Gambar 1.4 Ekosistem

Sumber : <https://slideplayer.info/slide/12756010/>

1.2.3 Konsep Ekologi Pemerintahan

Sejarah lahirnya studi ekologi yang dapat diintisarikan sebagai berikut. Studi ekologi modern dikembangkan pada awal abad ke-17 oleh Antoni Van Leeuwenhoek dan Richard Bradley yang dapat dikatakan merupakan tokoh perintis. Selain itu terdapat Alexander Von Humbolt yang juga mengembangkan pemikiran mengenai ekologi sebagai bagian dari ilmu biologi yang kemudian berkembang memasuki bidang-bidang lainnya, salah satunya adalah bidang ilmu sosial. Ilmu pemerintahan sebagai bagian dari ilmu sosial kemudian mengadopsi konsep, teori, paradigma maupun hukum

yang berkembang dalam ilmu ekologi, dengan asumsi bahwa pemerintahan sebagai sebuah sistem pada dasarnya adalah sebuah organisme hidup (*living organism*) yang lahir, hidup, berkembang dan ada kemungkinan kemudian akan mati atau digantikan oleh sistem yang lainnya. Berdasarkan asumsi tersebut kemudian dikembangkan kajian tentang ekologi pemerintahan. Ekologi pemerintahan muncul karena adanya gejala dan peristiwa pemerintahan yang silih berganti dan dinamis selama bertahun-tahun. Selanjutnya, kinerja pemerintahan tersebut dinilai kemudian dan dibandingkan dengan negara lain (Wasistiono, 2013 : 37).

Otto Soemarwoto mengatakan bahwa ekologi adalah berinteraksi pula dengan bidang-bidang lainnya, sehingga memunculkan ekologi pembangunan, ekologi kependudukan, ekologi pangan, ekologi pariwisata, serta bidang-bidang lainnya yang menggambarkan adanya interaksi dengan lingkungan hidupnya. Berdasarkan asumsi tersebut, dapat dikatakan bahwa pemerintah adalah sebuah organisme hidup yang lahir, hidup, berkembang, dan dapat mati. Oleh karena itu, gejala dan peristiwa pemerintahan dapat dianalisis dengan kajian ekologi.

Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan, mengurus kesejahteraan rakyat, dan pembangunan masyarakat dengan melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan dalam negara. Pemerintahan merupakan sebuah sistem yang dinamis di mana perubahan lingkungan terjadi dengan sangat cepat dan sulit diprediksi. Oleh karena itu, perlu suatu ilmu yang mempelajari interaksi komponen pembentuk sistem pemerintahan dengan lingkungannya, baik dalam segi internal maupun eksternalnya. Pada hakikatnya, permasalahan lingkungan hidup merupakan permasalahan ekologi. Berkembangnya lingkungan secara dinamis dan sulit diprediksi menimbulkan pemikiran di mana perlu adanya ilmu yang mengatur tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya termasuk cara beradaptasi dengan perubahan lingkungan.

Pemerintah sebagai sebuah organisasi oleh banyak kalangan diibaratkan sebagai sebuah organisme hidup layaknya binatang dan tumbuh-tumbuhan, yang dilahirkan atau dibentuk, berkembang,

dan kemudian dapat mati. Karena memiliki karakteristik seperti binatang atau tumbuh-tumbuhan, makanya dapat dilakukan kajian secara ekologis terhadap pemerintah. Dikatakan demikian karena pemerintah adalah lembaga negara yang diberi kewenangan untuk melindungi, melayani, memfasilitasi kepentingan negara dan publik. Sedangkan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari gejala dan peristiwa pemerintahan dalam konteks kewenangan dan pelayanan publik.

Sebagai lembaga yang hidup dan berkembang, pemerintah berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Dalam konteks itulah kajian ekologi pemerintahan dapat digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, mem-verifikasi gejala dan peristiwa yang berkaitan dengan hubungan timbal balik antara pemerintah dengan lingkungan sekitarnya. Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara lembaga tertinggi dan tinggi negara dengan masyarakatnya dalam rangka menjalankan kewenangan untuk melayani publik. Bidang kajian ilmu pemerintahan adalah kewenangan, yakni kekuasaan yang sah (*legitimate power*) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Menurut Alexander Von Humbolt mengembangkan pemikiran ekologi dalam bidang sosial dengan berasumsi bahwa pemerintahan merupakan organisme hidup (*living organism*) yang lahir, hidup, berkembang, dan kemungkinan kemudian akan mati atau digantikan dengan sistem lainnya. Berdasarkan asumsi itulah maka dikembangkan kajian ilmu tentang ekologi pemerintahan. Dengan demikian, Ekologi Pemerintahan adalah suatu ilmu yang mempelajari adanya proses saling memengaruhi sebagai akibat adanya hubungan normatif secara total dan timbal balik antara pemerintah dengan lembaga-lembaga tertinggi Negara maupun antarpemerintah, vertikal-horisontal, dan masyarakatnya (Wasistiono, 2013 : 13).

Adapun ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara lembaga tertinggi dan tinggi negara dengan masyarakatnya dalam rangka menjalankan kewenangan untuk melayani publik. Pengertian pemerintah dan ilmu pemerintahan berkaitan dengan ekologi sebagai ilmu lanjutan. Ilmu pemerintahan sebagai bagian dari ilmu sosial mengadopsi konsep, teori, paradigma

ataupun hukum yang berkembang dalam ilmu ekologi, dengan asumsi bahwa pemerintahan sebagai sebuah sistem pada dasarnya merupakan organisme hidup yang lahir, hidup, berkembang dan kemungkinan akan mati atau digantikan oleh sistem lainnya. Ekologi dan pemerintahan memegang peranan penting dalam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara sehingga ilmu tentang ekologi pemerintahan ini sangat baik untuk dikembangkan.

1. Studi/Kajian Ekologi Pemerintahan

Studi ekologi pemerintahan adalah studi ilmiah yang memadukan antara kajian ekologi dengan ilmu pemerintahan. Studi tersebut dapat dilihat dari tiga sudut pandang yaitu sebagai berikut. Dari sudut pandang ekologi, kajian ini melihat pemerintahan sebagai sebuah “ekosistem”, sehingga berbagai teori, paradigma, pendekatan, konsep, prinsip yang digunakan sebagai alat analisis pada ekologi dipakai pula pada kajian ekologi pemerintahan. Menurut Sadu Wasistiono (2013 : 13-17) terdapat beberapa hal penting yang biasanya digunakan di dalam kajian ekologi yaitu:

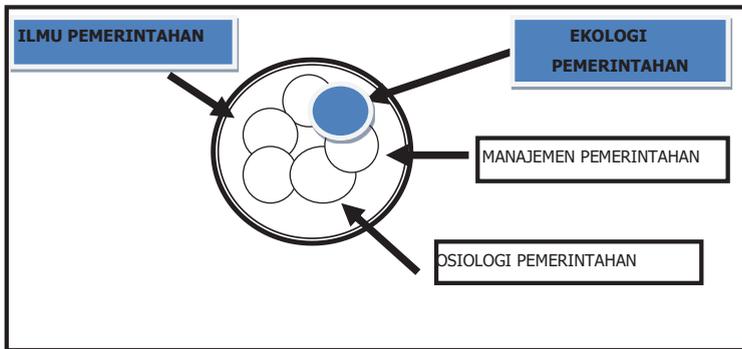
- a. Memandang objek sebagai sebuah ekosistem
Berdasarkan cara pandang ini, maka sebuah entitas pemerintahan dilihat sebagai sebuah ekosistem yang memiliki sebuah lingkungan strategis tersendiri serta berinteraksi dengan lingkungannya. Dengan lingkungan yang berbeda, sebuah entitas pemerintahan akan dapat memiliki interaksi yang berbeda dengan entitas pemerintahan lainnya.
- b. Penggunaan paradigma antroposentrik
Menurut Meriam yang dimaksud dengan *anthropocentric* adalah “*considering human beings as the most significant entity of the universe.*” Dengan demikian, pandangan antroposentrik melihat manusia merupakan entitas yang terpenting dan menjadi faktor utama dalam alam semesta. Konkordan dengan pandangan tersebut, apabila entitas pemerintahan menggunakan pandangan antroposentrik maka pemerintah akan menjadi pusat perhatian dan faktor utama dari kegiatan berbangsa dan bernegara.

c. Penggunaan pendekatan holistik

Menurut pandangan kelompok ini, memahami gejala dan peristiwa pemerintahan perlu dengan pandangan holistik. Artinya, aktivitas pemerintahan bukanlah aktivitas individual melainkan aktivitas bersama, sehingga dalam menjalankannya perlu memerhatikan unsur-unsur lainnya secara komprehensif dan berkelanjutan. Penyelenggara pemerintahan yang memiliki sikap egoisme sektoral ataupun fanatisme regional/kedaerahan menunjukkan bahwa mereka tidak memahami ekologi pemerintahan. Dengan cara pandang holistik maka semua kebijakan yang dibuat oleh pemerintah perlu dipikirkan dampaknya secara menyeluruh.

d. Adanya mekanisme yang berfungsi memelihara sistem dalam keadaan seimbang dinamis.

Prinsip ini dalam memandang gejala dan peristiwa pemerintahan dari sudut pandang ekologi yaitu setiap aksi yang dilakukan oleh pemerintah akan menimbulkan reaksi. Reaksi yang berlebihan dari kelompok sasaran kebijakan pemerintah karena tidak diperhitungkan dengan cermat, dapat menyebabkan rusaknya Sistem pemerintahan atau bahkan tumbangannya pemerintahan. Gejala semacam itu pada akhirnya akan menemukan titik keseimbangan baru, baik secara alamiah maupun melalui suatu rekayasa. Keseimbangan yang terjadi secara alamiah akan berjalan sangat lambat karena sifatnya yang evolutif. Penjelasan mengenai latar belakang ekologi pemerintahan dilihat dari sudut pandang ilmu pemerintahan dapat disederhanakan melalui gambar sebagai berikut :



Gambar 1.5 latar belakang ekologi pemerintahan dari sudut pandang ilmu pemerintahan

Sumber : Wasistiono, 2013

Berdasarkan gambar di atas, menurut Wasistiono (2013 :17) Dari hal penting tersebut, ekologi dapat dilihat dari tiga sudut pandang berikut.

- a. Ekologi hampir sama dengan sudut pandang politik, yakni mencoba menuangkan buah pikirannya pada bidang lain dengan menggunakan alat analisis yang berasal dari kajian ekologi. Selain itu, ekologi juga melihat mekanisme yang selalu terpelihara dalam keadaan seimbang dinamis.
- b. Sudut pandang ilmu pemerintahan merupakan salah satu wujud bangunan keilmuan dari ilmu pemerintahan, selain sosiologi pemerintahan, psikologi pemerintahan, manajemen pemerintahan, dan sebagainya. Teori, prinsip, konsep studi ekologi dipinjam untuk menjelaskan gejala dan peristiwa pemerintahan.
- c. Sudut pandang eklektik, bahwa kajian ekologi pemerintahan merupakan interface antara kajian ekologi dan ilmu pemerintahan. Artinya, ekologi dengan ilmu pemerintahan berkedudukan sejajar, tidak dalam arti ilmu yang satu lebih besar dari ilmu yang lain.

Ekologi Pemerintahan dapat juga didefinisikan sebagai cabang ilmu pemerintahan yang mempelajari pengaruh lingkungan ruang dan waktu terhadap pemerintahan, baik sebagaimana adanya (*das sein*) maupun sebagaimana diharapkan (*das sollen*). Kajian

ekologi pemerintahan dapat digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, memverifikasi gejala dan peristiwa yang berkaitan dengan hubungan timbal balik antara pemerintah dengan lingkungan sekitarnya. Kajian ekologi pemerintahan dengan memandang objek sebagai sebuah ekosistem. Cara pandang ini dilihat sebagai sebuah ekosistem yang memiliki sebuah lingkungan strategis tersendiri serta berinteraksi dengan lingkungannya.

Menurut Hasibuan (2019:38) Ruang lingkup ekologi pemerintahan dapat mencakup:

- a. Dialektika antara pegawai pemerintah dengan pemerintah, subsistem pemerintahan, subsistem pemerintahan dengan sistem pemerintahan, dan masyarakat dengan penyelenggara pemerintahan;
- b. Distribusi kewenangan dikaitkan dengan analisis ekologi;
- c. Studi saling ketergantungan antara unit-unit pemerintahan dengan lingkungan yang dimiliki pemerintahan dengan mempelajari keberadaan dan pengaruh “pemerintahan bayangan” terhadap entitas pemerintahan yang formal.

Ekologi Pemerintah merupakan perpaduan antara studi ekologi dengan ilmu Pemerintah, dengan konsekuensi ada berbagai konsep, hukum, teori dari masing-masing ilmu yang dipinjam atau digunakan untuk menjelaskan gejala dan peristiwa ekologi dibidang Pemerintah:

- a. Ekologi Pemerintah mempelajari hubungan timbal balik antara Pemerintah sebagai sebuah organisme dengan lingkungan sekitarnya baik lingkungan internal maupun eksternalnya. Di dalam lingkungan internal sistem Pemerintah terdapat subsistem maupun subsistem Pemerintah yang dalam implementsasinya memberikan pengaruh yang signifikan terhadap jalannya Pemerintah sebagai sebuah sistem.
- b. Ekologi Pemerintah dipelajari dalam agar dapat diperoleh pengetahuan yang benar mengenai komponen yang terlibat dalam interaksi antara Pemerintah dengan lingkungannya, proses interaksinya serta dampaknya bagi kehidupan umat manusia.
- c. Ekologi Pemerintah adalah kajian yang membahas hubungan

timbangan antara Pemerintah sebagai sebuah sistem dengan lingkungan internal dan lingkungan eksternalnya

Dalam kajian ekologi manusia dikenal dengan hubungan manusia dengan alam yakni teori antroposentris. Jadi semua yang ada di alam ini adalah untuk manusia. Selanjutnya, penggunaan paradigma antroposentrik yakni cara pandang bahwa pemerintah akan menjadi pusat perhatian dan faktor utama dari kegiatan berbangsa dan bernegara. Penggunaan pendekatan holistik merupakan cara pandang bahwa kebijakan dibuat oleh pemerintah dan memikirkan dampaknya secara menyeluruh. Untuk itu, diperlukan adanya mekanisme yang berfungsi memelihara sistem dalam keadaan seimbang dan dinamis. Reaksi yang berlebihan dari kelompok sasaran kebijakan pemerintah yang tidak diperhitungkan dengan cermat, dapat menyebabkan rusaknya sistem pemerintahan dan kejatuhan pemerintahan.

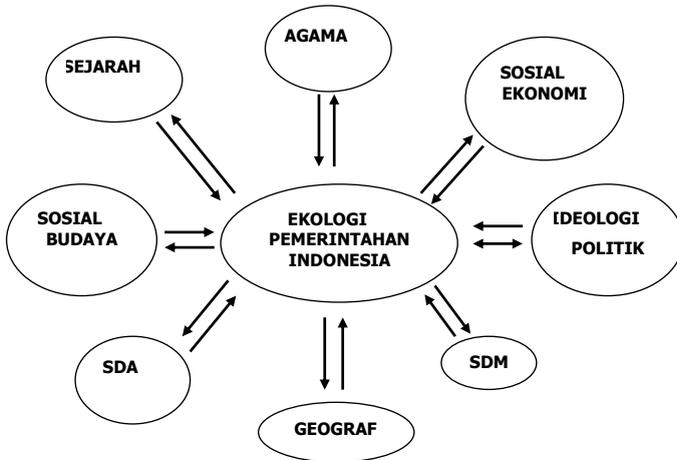
Oleh karena itu, ekologi pemerintahan merupakan landasan alat analisis bagi pengambil kebijakan dalam pengambilan keputusan pemerintah daerah. Hal itu disebabkan hubungan manusia, lembaga pemerintahan dan lingkungan alam maupun sosial, antara manusia mempunyai sifat-sifat tertentu (komunitas) dan saling menyesuaikan antara manusia dengan lingkungan sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan dari suatu negara. Namun tidak sedikit dari manusia yang sadar akan pentingnya menjaga alam. Sebagaimana telah dipahami bahwa alam merupakan tempat manusia untuk hidup dan berkembang biak. Hubungan manusia dengan alam saling keterkaitan, dari alamlah manusia mendapat penghidupan dan tanpa dukungan dari alam manusia dan makhluk lainnya akan terancam. Ketidakramahan manusia terhadap alam akan berdampak pada diri manusia dan makhluk lainnya pun akan terancam (Hasibuan, 2019 : 38).

Syafiie (2019:4) terdapat beberapa definisi ekologi pemerintahan, di antaranya sebagai berikut:

- a. Dialektika antara pegawai pemerintah dan pemerintah sebagai sebuah sistem;

- b. Dialektika antara subsistem dan sub-sub sistem pemerintahan dengan sistem pemerintahan;
- c. Dialektika antara masyarakat dan penyelenggara pemerintahan;
- d. Distribusi kewenangan dikaitkan dengan analisis ekologis;
- e. Pertemuan antara pengaruh akar-akar ilmu sosial yang bersifat ekologis dengan prinsip-prinsip pemerintahan;
- f. Studi saling ketergantungan antara unit-unit pemerintahan dan lingkungannya menyangkut dampak pemerintahan akibat perubahan lingkungan;
- g. Mempelajari lingkaran pemerintahan yang mendorong masyarakat pada suatu tindakan yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan;
- h. Mempelajari keberadaan dan pengaruh “pemerintahan bayangan” terhadap entitas pemerintahan yang formal.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa ekologi pemerintahan mencakup banyak ruang lingkup, dimensi, teori, konsep, sudut pandang, dan hal-hal penting lainnya yang diperlukan untuk memahami seluruh komponen yang ada dalam ekologi pemerintahan sebelum menerjunkan langsung untuk pengaturan kepada masyarakat. Jadi unsur-unsur ekologi meliputi juga sosial ekonomi, selain sosial politik, sosial keagamaan, sosial budaya dan ideologinya sendiri sebagai lima hal (panca gatra) yang dibahas dalam sosial kemasyarakatan di satu pihak, dan di lain pihak juga meliputi pengaruh sumber daya manusia, pengaruh sumber daya alam dan Geografi, sebagai sebagai tiga hal (tri gatra).



Gambar 1.6 Skema panca gatra pengaruh sosial

Sumber : Syafiie, 2019

a. Panca Gatra

1) Sosial Budaya

Sosial Budaya sangat berpengaruh terhadap sepaik terjang pemerintahan karena bila masyarakat memiliki budaya yang keras, egalitarian, vulgar maka akan menimbulkan demokrasi yang tidak menutup kemungkinan kebablasan, sebaliknya bila masyarakat adalah kelompok penurut yang mengikuti apa yang dikatakan pemerintah sami'na wa 'ata'na (saya dengar dan saya taat) maka pemerintah dengan mudah menginjak hak azasi manusia.

2) Sejarah

Sejarah adalah catatan perjalanan waktu suatu bangsa dan negara lalu di dalamnya ditemukan tempat berbagai wilayah pemerintahan seperti di Indonesia Nusantara ini adalah berbagai kerajaan kerajaan besar dan kecil dengan segala kemegahan dan kehancurannya namun tetap dicatat sebagai perjalanan waktu dalam ruang kehidupan ini.

3) Ideologi

Ideologi itu sendiri diterjemahkan sebagai sistem pedoman hidup yang menjadi cita-cita untuk dicapai oleh sebagian besar

individu dalam masyarakat yang bersifat khusus, disusun secara sadar oleh para tokoh pemikir negara serta kemudian menyebarkannya secara resmi sebagai dasar negara.

4) Sosial Ekonomi

Sosial Ekonomi sangat berpengaruh pada situasi pemerintahan, karena perekonomian masyarakat yang timpang yang diikuti dengan besarnya jurang pemisah antara pemerintah dengan masyarakat jelata, banyaknya pengangguran dan sulitnya lapangan kerja membuat suburnya muncul gerakan sosial komunis, yang berangkat dengan pembicaraan kerakyatan, demonstrasi buruh dan berakhir dengan perwujudan partai tunggal yang melakukan pembantaian terhadap kaum berjuis, kapitalis dan para konglomerat.

5) Sosial Keagamaan

Sosial Keagamaan sangat berpengaruh pada keberadaan pemerintahan, karena kelompok yang menduduki pemerintahan, jika dimulai oleh mereka yang terdidik secara keagamaan dengan iman yang kuat akan mengantisipasi keberadaan munculnya perjudian, pelacuran, perampokan hak rakyat, tetapi jika pemerintah terdiri kaum sekuler dan banyaknya gerakan anti pemerintahan karena menyimpang dari jalur keagamaan maka pemerintah harus berpura pura beragama untuk dengan membentuk publik opini, bahwa mereka bersih walaupun hanya sekedar tipuan.

b. Tri Gatra

1) Pengaruh Geografis

Faktor geografis ini seperti, perbatasan strategis (*strategic frontier*), desakan penduduk (*population pressures*), daerah kepulauan (*sphere of influence*) dan lain-lain sangat mempengaruhi pemerintahan. Kendati seluruh faktor, faktor tersebut di atas adalah faktor-faktor yang terdapat dalam geografi. Karenanya terdapat hubungan yang erat pula antara ilmu pemerintahan dengan ilmu bumi karena pengaruh dimaksud ditujukan pada keberadaan suatu pemerintahan terutama ekologiannya.

Sebagai contoh dari pengaruh-pengaruh tersebut yaitu untuk menentukan apakah suatu pemerintahan itu harus diciptakan sentralisasi yang kakuterpusat, atau desentralisasi yang berlebihan dengan pemberian pendemokrasian yang besar kepada daerah, sampai tampak bukan lagi sub sistem tetapi seperti negara yang berdiri sendiri. Daerah kepulauan karena terpisah-pisah maka untuk efisiensi kerja, dalam pemerintahannya sebaiknya dilaksanakan desentralisasi. Daerah kontinental mudah dilaksanakan pengawasan dan relatif lebih mudah pula transportasi maka dalam pemerintahannya sebaiknya dilaksanakan sentralisasi. Daerah yang penduduknya homogen cenderung untuk melaksanakan sentralisasi, sedangkan yang penduduknya heterogen cenderung untuk melaksanakan desentralisasi.

2) Pengaruh SDM

SDM adalah Sumber Daya Manusia, yang dapat membuat suatu pemerintahan maju karena kepakaran, moralitas dan budaya penduduk suatu negeri, tetapi bisa pula hancur karena pemerintah yang memimpin tidak disukai oleh rakyatnya akibat kezaliman pemimpinannya, untuk itu pertama-tama perlu dibedakan antara rakyat, warga negara, masyarakat dan penduduk yaitu sebagai berikut di bawah ini :

- a) Rakyat adalah salah satu. syarat negara, yaitu keseluruhan orang-orang yang berada dalam negeri maupun di luar negeridan mempunyai hak pilih atau dicabut hak pilihnya untuk waktu tertentu, atau belum mempunyai hak pilih karena persyaratan tertentu;
- b) Warganegara adalah mereka yang dinyatakan sebagai warga suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan negara tersebut;
- c) Masyarakat adalah mereka yang bersama-sama menjadi anggota suatu negara yang harus dibina dan dilayani oleh administrasi pemerintahan setempat. Penduduk adalah mereka yang menjadi penghuni dari suatu negara tertentu yang harus diinventarisir.

4) Pengaruh SDA

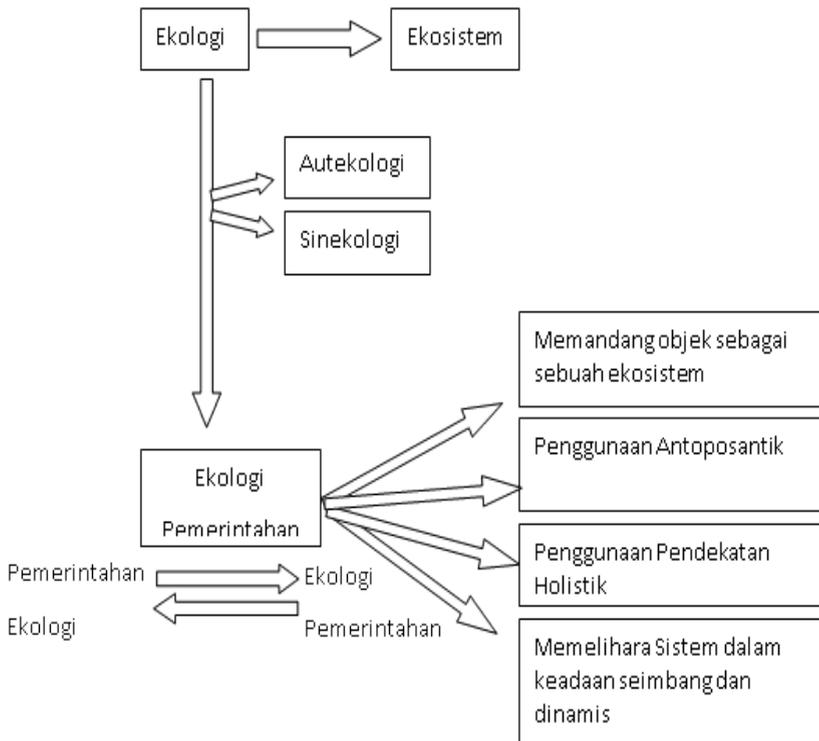
SDA adalah Sumber Daya Alam, mulai dari flora dan fauna yang dimiliki sampai pada hasil tambang, keindahan alam pariwisata, serta sawah ladang yang mereka miliki. Akan halnya SDA, dua negara dapat saling bertempur mati-matian karena persoalan SDA ini, lihatlah Inggris dan Argentina berebut Pulau Malvinas, bahkan Indonesia dan Malaysia sempat menimbulkan ketegangan persoalan pulau Sipadan dan Ligitan yang kemudian lepas ke nagara jiran tersebut, terlepas dari benar atau salah maka lepasnya Timor Timur menjadi Negara Timor Leste, juga menjadi hujatan orang kepada Presiden Habibie karena memberikan dua opsi, Bahkan karena keterikatan harta kekayaan sebagian pemimpin Indonesia bangsa ini bertekuk lutut kepada Malaysia walau negeri jiran ini mencuri ikan sebagai kekayaan Sumber Daya Alam Indonesia.

2. Ekologi Pemerintahan versus Pemerintahan Ekologik

Ekologi Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai (cabang) Ilmu Pemerintahan yang mempelajari pengaruh lingkungan ruang-waktu terhadap pemerintahan, baik sebagaimana adanya (*das Sein*), maupun sebagaimana diharapkan (*normatif, das Sollen*). Nilai-nilai lingkungan ruang dan waktu yang ditransfer, dipertukarkan, atau ditransformasikan dari lingkungan ke bidang pemerintahan, searah atau timbal-balik adalah energi dari lingkungan fisik, suara, (vote, dukungan legitimasi, kontrol) dari lingkungan sosial, dan dalam arti tertentu, rahmat dari lingkungan transedental, yaitu Tuhan Yang Maha Esa (ingat, presiden Republik Indonesia mengesahkan setiap RUU menjadi UU, “Dengan Rahmat Tuhan Yang Mahaesa”. Ketiga nilai tersebut dengan vehicles-nya masing-masing sehingga melembaga, menjadi alat-alat pendukung kehidupan pemerintah dalam arti lain, Ketuhanan bukan hanya pendukung, tetapi maha Pencipta segala sesuatu, sumber kehidupan itu sendiri (Ndraha, 2011 : 463) Dalam hubungan itu diperlukan Ilmu Pemerintahan yang peduli terhadap lingkungannya. Produk kepedulian itu mendorong upaya pembentukan hibrida lain yang dapat disebut (Ilmu)

Pemerintahan Ekologik (*Kybernology of Environment, atau Ecological Kybernology*), sejajar dengan *Ecology of Public Administration* di atas. Kedua hibrida: Ekologi Pemerintahan dan Pemerintahan Ekologik bersifat saling mendukung, persis seperti hubungan antara Administrasi Pembangunan dengan Pembangunan Administrasi. Ilmu Pemerintahan Ekologik itu mempelajari upaya pemerintah dalam mengontrol dan membimbing perilaku manusia terhadap lingkungannya, di satu pihak guna meningkatkan dukungan lingkungan terhadap kehidupan, dan di pihak lain memelihara harmoni antara manusia dengan lingkungannya. Sementara itu, Ekologi Pemerintahan mempelajari pengaruh ekologik lingkungan berdimensi ruang-waktu terhadap pemerintahan. Secara akademik, Ilmu Pemerintahan Ekologik sejajar dengan Administrasi Lingkungan (Ndraha, 2011 : 467).

Berikut disajikan bagan kerangka dari bab 1 :



1.3 Rangkuman

1. Ekologi berasal dari kata dalam bahasa Yunani yaitu oikos dan logos. Ekologi sering juga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Bahkan ada yang mengatakan ilmu yang mempelajari rumah tangganya makhluk hidup.
2. Ekologi Pemerintah sebagai cabang ilmu Pemerintah yang mempelajari pengaruh lingkungan ruang-waktu terhadap Pemerintah, baik sebagaimana adanya (*das sein*) maupun sebagaimana diharapkan (*normative, das sollen*).

1.4 Latihan/Tugas/Eksperimen

1. Analisa konsep ekologi pemerintahan dan manfaatnya mempelajari ekologi pemerintahan?
2. Apa yang anda lakukan dalam lingkungan pemerintahan jika anda menjadi seorang pemimpin ?
3. Kajian ekologi pemerintahan memiliki tiga kategori lingkungan yang sangat mempengaruhi, yaitu (1) lingkungan fisik, (2) lingkungan biologis, dan (3) lingkungan sosial. Berikan pandangan anda tentang lingkungan sosial pada kondisi saat ini?
4. Carilah contoh kasus ekologi pemerintahan yang terjadi di Indonesia, analisis dan jelaskan !

1.5 Rujukan

- Hasibuan, Sjahbana, A (2019). Peranan Ekologi Pemerintahan Dalam Meningkatkan Daya Saing Kebijakan Pemerintah Daerah. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* Vol. 2, No. 1, Juni 2019
- Syafiie, Kencana. I. 2019. *Ekologi Pemerintahan Di Indonesia*. Bandung : Pustaka Reka Cipta.
- Odum, EP. 1996. *Fundamentals of ecology*. Philadelphia: WB Saunders Company. 383 pp. <https://doi.org/10.1002/sce.3730380426>.
- Anonim. 2018. *What is ecology?* [https:// www.khanacademy.org/science/ biology/ecology/intro-to-ecology/a/what-is-ecology](https://www.khanacademy.org/science/biology/ecology/intro-to-ecology/a/what-is-ecology).

BAB II.

KONSEP SISTEM PEMERINTAHAN

2.1 Pendahuluan

Sistem pemerintahan negara merupakan sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga lembaga negara. Dengan demikian, sistem pemerintahan mensyaratkan adanya interaksi antara eksekutif, legislatif, dan lembaga negara lainnya untuk mencapai tujuan bernegara. Buku ajar ini akan menjelaskan tentang konsep Good Governance. Secara lengkap buku ajar pada bab 2 ini menjelaskan tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Konsep sistem pemerintahan
2. Sistem pemerintahan parlementer dan presidensial
3. Sistem pemerintahan di Indonesia

Setelah mempelajari buku ajar ekologi pemerintahan ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Memahami konsep sistem pemerintahan
2. Memahami sistem pemerintahan parlementer dan presidensial
3. Memahami sistem pemerintahan yang ada di Indonesia

2.2 Penyajian

2.2.1 Konsep Sistem Pemerintahan

Menurut (Sarundajang, 2012 : 33) sistem pemerintahan adalah sebutan populer dari bentuk pemerintahan. Hal didasari dari pemikiran bahwa bentuk negara adalah peninjauan secara sosiologis, sedangkan secara yuridis disebut bentuk pemerintahan, yaitu sistem yang berlaku yang menentukan bagaimana hubungan antara alat perlengkapan negara diatur oleh konstitusinya. Karena itu bentuk pemerintahan sering dan lebih populer disebut sebagai sistem pemerintahan.

Ketika menghubungkan antara konsep sistem dengan sistem pemerintahan yaitu sebagai suatu susunan atau tatanan berupa suatu struktur yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang berkaitan satu sama lain secara teratur dan terencana untuk mencapai tujuan. Apabila salah satu bagian tersebut berfungsi melebihi wewenangnya atau kurang berfungsi, maka akan mempengaruhi komponen yang lainnya. Oleh karena itu menurut (Sarundajang, 2012) sistem pemerintahan dapat disebut sebagai keseluruhan dari susunan atau tatanan yang teratur dari lembaga-lembaga negara yang berkaitan satu dengan yang lainnya baik langsung ataupun tidak langsung menurut suatu rencana atau pola untuk mencapai tujuan negara tersebut.

Pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu (*not to do*) dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri. Dengan begitu ilmu pemerintahan digunakan sebagai ilmu untuk mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, yudikasi dan eksekusi, dalam hubungan pusat dengan daerah, antar lembaga serta antara yang memerintah dengan diperintah secara baik dan benar dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan.

1. Konsep Sistem

Pemerintah sebagai sebuah sistem harus pula memiliki keseimbangan dinamis, agar sistemnya dapat bekerja dengan optimal serta mampu menjaga eksistensinya. Keseimbangannya perlu dipelihara oleh seluruh komponen sistem tanpa kecuali. Untuk kepentingan tersebut, maka semua anggota sistem harus “sadar sistem”, artinya mereka harus memahami teori sistem dan bekerja secara sistemik. Semua komponen sistem mempunyai peran fungsional, sehingga tidak perlu ada egoisme komponen, karena merasa unitnyalah yang paling penting.

Upaya untuk menjaga agar sistem pemerintahan tetap seimbang dinamis, perlu dibuat mekanisme umpan balik (*feedback*) dan umpan ke depan (*feedforward*) yang terbuka dan objektif. Apabila mekanismenya terhambat atau dibuat artifisial, ada kemungkinan besar sistem akan terganggu, bahkan pada ujungnya dapat membuat sistem pemerintahan menjadi berhenti atau bahkan kolaps. Pimpinan organisasi pemerintahan yang sadar sistem akan membuka seluas-luasnya mekanisme umpan balik supaya dia mendapat informasi yang aktual dan akurat. Mekanisme umpan balik dapat berupa penyediaan kotak saran, melalui rapat, membuka jejaring sosial terbatas dan berbagai cara lainnya (Wasistiono, 2013 : 32).

Mengingat kajian ekologi pemerintahan adalah melihat gejala dan peristiwa pemerintahan dengan meminjam sudut pandang ekologis, maka perlu terlebih dahulu dibahas mengenai pemerintah sebagai sebuah sistem. Kata sistem selama ini sudah banyak digunakan di Indonesia untuk berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan. Beberapa definisi tentang sistem antara lain sebagai berikut.

- a. *System is set of detailed methods, procedures, and routines established or formulated to carry out a specific activity, perform a duty, or solve a problem.*
- b. *System is organized, purposeful structure regarded as a “whole” consisting of interrelated and interdependent elements (components, entities, factors, members, parts etc.). These elements continually influence one another (directly or indirectly) to maintain their activity and the existence of the system, in order to achieve the common purpose the ‘goal’ of the system.*

Berdasarkan uraian di atas mengenai sistem dapat dipahami adanya dua pengertian.

- a. Sistem adalah seperangkat metode, prosedur terinci dan dijalankan secara terus menerus yang dibuat atau dibentuk untuk menjalankan aktivitas khusus, meningkatkan unjuk kerja, atau memecahkan masalah.
- b. Sistem adalah sebuah struktur bertujuan yang terorganisasi yang dinyatakan sebagai sebuah keseluruhan yang terdiri dari elemen-elemen yang saling terhubung dan saling ketergantungan. Masing-masing elemen saling memengaruhi secara terus menerus guna memelihara aktivitas mereka dan menjaga eksistensi sistem, dalam rangka mencapai tujuan dari sistem yang telah ditetapkan sebelumnya (*Bussiness Dictionary* dalam Wasistiono, 2013 : 33).

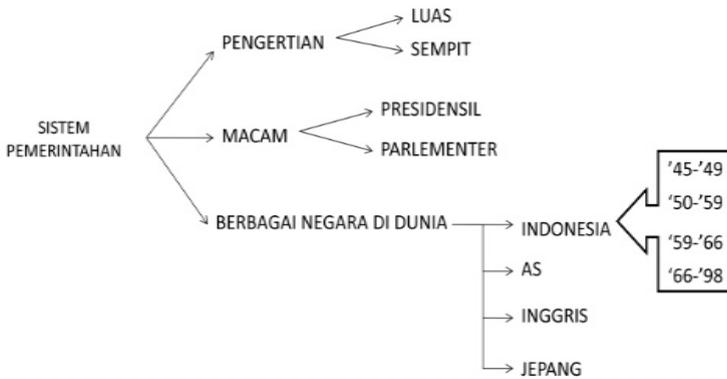
Sistem dapat disebut cara atau metode. Selanjutnya sistem diartikan sebagai totalitas komponen yang terdiri dari sub komponen-sub komponen yang saling berhubungan, saling ketergantungan satu sama lain yang pada gilirannya sub komponen tersebut merupakan sistem tersendiri pula untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa unsur-unsur pokok dari sistem :

- a. Himpunan bagian-bagian
- b. Bagian- bagian itu saling berkaitan
- c. Bekerja mandiri / bersama-sama/ saling mendukung
- d. Pencapaian tujuan bersama
- e. Terjadi dalam lingkungan yang rumit dan kompleks

Adapun ciri-ciri utama suatu sistem meliputi :

- f. Semua sistem memiliki tujuan tertentu
- g. Sitem mempunyai batas (boundary) tertentu
- h. Sistem bersifat terbuka
- i. Sistem itu terdiri dari sub sistem
- j. Sistem merupakan kebulatan yang utuh (wholism)
- k. Sistem saling berhubungan/ berkaitan baik internal maupun eksternal
- l. Ada transformasi/ ada proses transformasi
- m. Ada mekanisme control
- n. Mampu mengatur diri sendiri/ menyesuaikan diri.

Lebih lengkapnya, berikut disajikan bagan system pemerintahan, sebagai berikut :



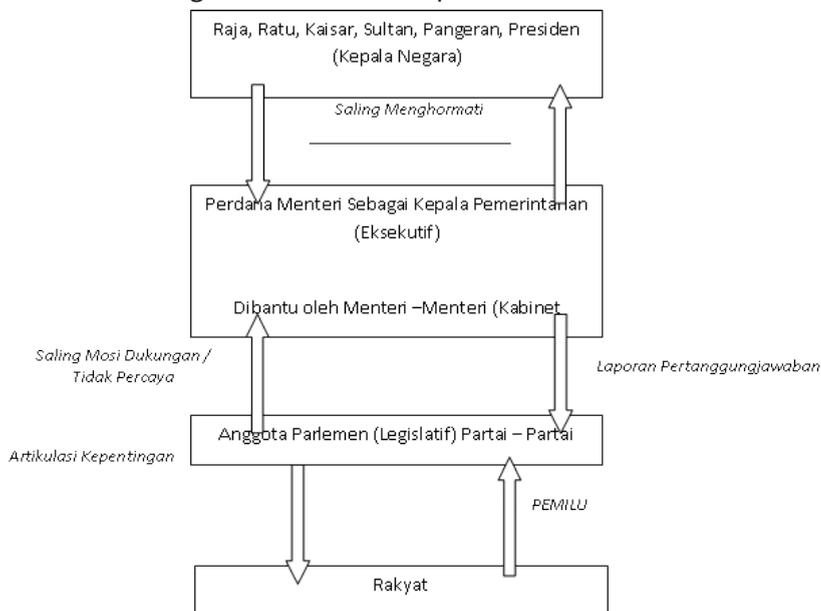
2. Konsep Pendekatan Sistem dalam Pemerintahan

Pendekatan sistem dalam pemerintahan dapat dilihat dari dua sistem meliputi :

- a. Sistem Pemerintahan Nasional Indonesia, terdiri dari ;
 - 1) Pemerintahan Nasional (Eksekutif, legislatif dan Yudikatif), merupakan suatu sistem
 - 2) Pemerintah Pusat (Eksekutif), merupakan subsistem pemerintahan nasional
 - 3) Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/ Kota), merupakan subsistem pemerintah pusat
 - 4) Pemerintahan Desa/ Kelurahan, merupakan subsistem pemerintah daerah.
- b. Jenis Sistem Pemerintahan
 - 1) Sistem Parlementer

Menurut (Syafiie, 2011 : 88) sistem parlementer digunakan untuk mengawasi eksekutif oleh legislatif, jadi kekuasaan parlemen lebih besar dari pada eksekutif. Dalam sistem ini Dewan Menteri (kabinet) bertanggungjawab kepada parlemen. Alan R. Ball dalam (Mariana, Paskalina, & Yuningsih, 2007) menamakan sistem pemerintahan parlementer ini dengan sebutan *the parliamentary types of government* dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a) Kepala negara hanya mempunyai kekuasaan nominal. Hal ini berarti bahwa kepala negara hanya merupakan lambang / simbol yang hanya mempunyai tugas-tugas yang bersifat formal, sehingga pengaruh politiknya terhadap kehidupan negara sangatlah kecil.
- b) Pemegang kekuasaan eksekutif yang sebenarnya/ nyata adalah perdana menteri bersama-sama kabinetnya yang dibentuk melalui lembaga legislatif/ parlemen; dengan demikian kabinet sebagai pemegang kekuasaan eksekutif riil harus bertanggung jawab kepada badan legislatif/parlemen dan harus meletakkan jabatannya bila parlemen tidak mendukungnya.
- c) Badan legislatif dipilih untuk bermacam-macam periode yang saat pemilihannya ditetapkan oleh kepala negara atas saran dari perdana menteri.



Gambar 2.1. Sistem Pemerintahan Parlementer

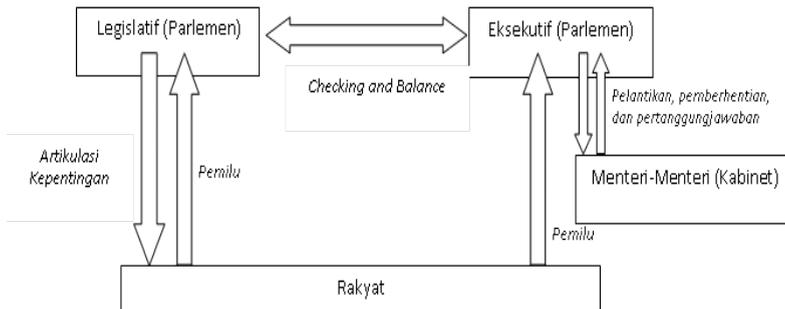
Sumber : Syafi'i dalam Anangkota, 2017

2) Sistem Presidensial

Menurut (Syafiie, 2011 : 90) sistem ini presiden (eksekutif) memiliki kekuasaan yang kuat, karena selain kepala negara presiden juga sebagai kepala pemerintahan yang sekaligus mengetuai kabinet (dewan menteri). Oleh karena itu agar tidak menjurus kepada diktatorisme, maka diperlukan *check and balances*, antara lembaga tinggi negara, inilah yang kemudian disebut dengan *checking power with power*.

Menurut S.L Witman dan J.J Wuest dalam (Syafiie, 2011 : 21) mengemukakan beberapa ciri – ciri sistem pemerintahan presidensial,yaitu :

- a) Presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan
- b) Presiden tidak dipilih oleh badan perwakilan tetapi oleh dewan pemilih dan belakangan peranan dewan pemilih tidak tampak lagi sehingga dipilih oleh rakyat
- c) Presiden berkedudukan sama dengan legislatif
- d) Kabinet dibentuk oleh Presiden, sehingga kabinet bertanggungjawab kepada presiden
- e) Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif, begitupun sebaliknya Presiden tidak dapat membubarkan badan legislatif.



Gambar 2.2 Sistem Pemerintahan Presidensial

Sumber : Syafi'i dalam Anangkota, 2017

3) Sistem Campuran

Sistem campuran atau quasi adalah sistem pemerintahan yang memadukan kelebihan dari sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. Dalam sistem ini diusahakan hal-hal yang terbaik dari kedua sistem pemerintahan tersebut. Dalam sistem pemerintahan ini, selain memiliki Presiden sebagai Kepala Negara, juga memiliki Perdana Menteri sebagai kepala Pemerintahan untuk memimpin kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen. Oleh (Mariana, Paskalina, & Yuningsih, 2007 : 32) menyebutkan bahwa berhubung sistem pemerintahan campuran ini sangat khas maka perlu ditentukan ciri-ciri utamanya, yaitu :

- a) Menteri-menteri dipilih oleh parlemen.
- b) Lamanya masa jabatan eksekutif ditentukan dengan pasti dalam konstitusi
- c) Menteri-menteri tidak bertanggung jawab baik kepada parlemen maupun kepada presiden

4) Sistem Referendum

Menurut Budiman Sagala dalam (Sarundajang, 2012 : 37) menyebutkan bahwa terminologi referendum adalah permintaan/persetujuan dan atau pendapat rakyat apakah setuju atau tidak terhadap kebijaksanaan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh badan eksekutif atau badan legislatif. Dalam sistem ini Parlemen tunduk kepada kontrol langsung dari rakyat. Kontrol dilakukan dengan dua cara, yaitu referendum dan usul inisiatif rakyat. Menurut (Sarundajang, 2012 : 39), Referendum merupakan kegiatan politik yang dilakukan oleh rakyat untuk memberikan keputusan setuju atau menolak terhadap kebijaksanaan yang ditempuh oleh Parlemen atau setuju atau tidak terhadap kebijaksanaan yang dimintakan persetujuan rakyat. Oleh (Sarundajang, 2012 :39) terdapat tiga macam referendum, yaitu :

a) Referendum Obligator

Referendum wajib, dimana berlakunya suatu undang-undang yang dibuat Parlemen, dan telah disetujui oleh

rakyat melalui suara terbanyak.

b) Referendum Fakultatif

Suatu undang-undang yang dibuat oleh Parlemen setelah diumumkan, beberapa kelompok masyarakat yang berhak meminta disahkan melalui referendum

c) Referendum Consultative

Referendum untuk soal-soal tertentu yang teknisnya rakyat tidak tahu.

2.3 Rangkuman

1. Menurut sistem parlementer digunakan untuk mengawasi eksekutif oleh legislatif, jadi kekuasaan parlemen lebih besar dari pada eksekutif. Dalam sistem ini Dewan Menteri bertanggungjawab kepada parlemen.
2. Sistem Presidensial, menurut sistem ini presiden memiliki kekuasaan yang kuat, karena selain kepala negara presiden juga sebagai kepala pemerintahan yang sekaligus mengetuai kabinet.

2.4 Latihan/Tugas/Eksperimen

1. Jelaskan masing-masing pengertian dari sistem presidensial dan parlementer!
2. Apa kelemahan dan kekurangan sistem presidensial dan parlementer ?
3. Sebutkan ciri-ciri sistem presidensial menurut S.L Witman dan J.J Wuest?
4. Mengapa sistem pemerintahan presidensial dianggap paling sesuai dengan pemerintahan Indonesia?
5. Apa perbedaan antara sistem pemerintahan Presidensial di indonesia dan Amerika Serikat?

2.5 Rujukan

- Sarundajang, S. H. (2012). Babak Baru Sistem Pemerintahan. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- Syafiie, I. K. (2011). Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Anangkota, Muliadi (2017) Klasifikasi Sistem Pemerintahan Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian. CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol.3 No.2
- Mariana, D., Paskalina, C., & Yuningsih, N. Y. (2007). Perbandingan Pemerintahan. Jakarta: Universitas Terbuka.

BAB III.

KONSEP GOOD GOVERNANCE

3.1 Pendahuluan

Salah satu upaya dalam mendukung terciptanya pelayanan publik yang baik dan berkualitas adalah perlu diterapkannya prinsip-prinsip *good governance* (tata pemerintahan yang baik) dalam sistem pemerintahan sebagai upaya untuk menciptakan kualitas pelayanan publik yang baik. *Good governance* (tata pemerintahan yang baik) merupakan sebuah konsep yang akhir-akhir ini dipergunakan secara teratur dalam ilmu politik terutama ilmu pemerintahan.

Buku ajar ini akan menjelaskan tentang konsep Good Governance. Secara lengkap buku ajar pada bab 3 ini menjelaskan tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Konsep Good Governance
2. Teori konsep good governance
3. Azas-azas, kriteria, prinsip, dan pilar good governance

Setelah mempelajari buku ajar ekologi pemerintahan ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Memahami konsep good governance
2. Memahami teori konsep dari good governance
3. Memahami azas-azas, kriteria, prinsip, dan pilar good governance

3.1.1 Pengertian Pemerintahan yang baik

Penyelenggaraan pemerintahan daerah, ada banyak pertimbangan yang harus dijadikan pegangan pokok agar konsep pelaksanaan otonomi dapat berjalan sebagaimana mestinya di antara berbagai pertimbangan tersebut adalah penerapan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*the good local governance*) yang merupakan salah satu prinsip yang perlu menjadi perhatian (Syauckani dalam Aridhayandi, 2018 : 886).

Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan, mengurus kesejahteraan rakyat, dan pembangunan masyarakat dengan melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan dalam negara. Pemerintahan merupakan sebuah sistem yang dinamis di mana perubahan lingkungan terjadi dengan sangat cepat dan sulit diprediksi. Oleh karena itu, perlu suatu ilmu yang mempelajari interaksi komponen pembentuk sistem pemerintahan dengan lingkungannya, baik dalam segi internal maupun eksternalnya (Hasibuan, 2019 : 37).

Pemerintah merupakan salah satu dari pelaku-pelaku dalam penyelenggaraan pemerintahan. Cabang kekuasaan eksekutif mewakili atau mengandung 2 (dua) karakter dalam dirinya, yaitu: pertama, sebagai alat kelengkapan atau orang negara; yang bertindak untuk dan atas nama negara. Tindakan eksekutif sebagai alat kelengkapan negara adalah tindakan negara; kedua, sebagai badan administrasi negara yang mempunyai kekuasaan mandiri yang dilimpahkan negara. Kekuasaan mandiri ini memungkinkan administrasi negara melakukan tindakan-tindakan mandiri, baik dilapangan pengaturan (*regelen*) maupun penyelenggaraan administrasi negara (*besturen*) (Aridhayandi, 2018 : 888).

Terdapat dua alat ukur bagi keabsahan tindak pemerintahan, yaitu:

- a. Peraturan perundang-undangan sebagai aturan hukum tertulis, dan
- b. Asas umum pemerintahan yang baik sebagai aturan hukum tidak tertulis.

Berdasarkan kedua alat ukur tersebut, bagi pemerintah pertama-tama dibutuhkan suatu aturan sebagai norma tindak pemerintahan. Rumusan semacam itu merupakan norma umum hukum administrasi negara yang dalam perkembangannya di beberapa negara saat ini ditampung dalam suatu kodifikasi hukum administrasi negara umum (Nasution, 2006 : 126)

Prinsip *good governance* dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan sebuah tuntutan bagi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih, transparan, dapat di pertanggungjawabkan, efektif dan efisien. *Good Governance* mengandung pengertian menjunjung tinggi nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara dan yang berhubungan dengan kepemimpinan. *Good Governance* juga merupakan wujud nyata dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang bersih atau tata kelola yang baik dan benar (Saragih, 2012 : 18).

Menurut Agustino (2007 : 182) *Good Governance* terdiri dari dua kata “*good*” dan “*governance*”. Arti *good* dalam *good governance* mengandung dua pengertian, *pertama*, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/ kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial; serta *kedua*, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Sedangkan *Governance* atau pemerintahan dalam Bahasa Inggris diartikan sebagai “ *the act, fact, manner of governing*” atau “Tindakan, fakta, pola cara-cara penyelenggaraan pemerintahan”.

Pemahaman *governance* tentu tidak sama dengan konsep *government*. Konsep *government* lebih ditujukan pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kekuasaan tertinggi (negara

dan pemerintahan). Di sisi lain, governance tidak sekedar melibatkan pemerintah, tetapi juga melibatkan peran stakeholder di luar negara dan pemerintah sehingga pihak yang terlibat menjadi sangat luas. Sementara itu, konsep governance diartikan pemerintahan menunjuk pada proses, yang melibatkan unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, serta masyarakat dan pihak swasta. Praktik yang terbaiknya disebut good governance (pemerintahan yang baik).

Tabel 3.1. Perbedaan governance dan government

No	Unsur Perbedaan	Government	Governance
1	Pengertian	Dapat berarti badan/ lembaga/ fungsi yang dijalankan oleh suatu organ tertinggi dalam suatu negara	Dapat berarti cara penggunaan ataupun pelaksanaan
2	Sifat Hubungan	Hierarkis dalam arti yang memerintah berada diatas sedangkan warga negara yang diperintah berada di bawah	Heterarkhis dalam arti ada kesetaraan kedudukan dan hanya berbeda dalam fungsi
3	Komponen yang terlibat	Sebagai subjek hanya satu yaitu institut pemerintah	Ada 3 komponen yang terlibat 1. Sektor pemerintah 2. Sektor swasta 3. Sektor masyarakat
4	Pemegang Peran Dominan	Sektor pemerintahan	Semua memegang peran sesuai dengan fungsinya masing-masing
5	Efek yang diharapkan	Kepatuhan warga negara	Partisipasi warga negara
6	Hasil akhir yang diharapkan	Pencapaian tujuan negara melalui kepatuhan warga negara	Pencapaian tujuan negara dan masyarakat melalui partisipasi sebagai warga negara maupun sebagai warga masyarakat

3.1.2 Teori Konsep *Good Governance*

Menurut Sujatno (2007 : 42-43) terdapat tiga teori yang menjadi kunci dalam pembahasan mengenai konsep *good governance* yaitu :

- a. Teori *Political Society* (masyarakat politik : partai politik, birokrasi, negara) adalah kumpulan organisasi-organisasi dalam masyarakat yang tujuan pendirian dan aktivitas utamanya adalah untuk memperoleh dan menjalankan kekuasaan politik.
- b. Teori *Economic Society* (masyarakat ekonomi) adalah kumpulan organisasi-organisasi-organisasi di dalam masyarakat yang tujuan pendirian dan aktivitas utamanya adalah untuk memperoleh keuntungan finansial.
- c. Teori *Civil Society* (masyarakat sipil/ masyarakat madani) adalah kumpulan organisasi-organisasi di dalam masyarakat yang tujuan pendirian dan aktivitas utamanya memiliki empat ciri :
 - 1) Non politis dan non ekonomi;
 - 2) Inisiatif pendiriannya datang dari bawah (grassroots);
 - 3) Menjunjung pluralitas; dan
 - 4) Mengembangkan demokrasi egaliter.

Dalam konsep *governance* paling dasar, disebut ada tiga *stakeholder* utamayangsalingsalingberinteraksidanmenjalankanfungsinya masing-masing yaitu negara atau pemerintah (*state*), sektor swasta atau dunia usaha (*private sektor*) dan masyarakat (*society*). Institusi pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sedangkan sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan masyarakat berperan dalam membangun interaksi sosial, ekonomi dan politik termasuk mengajak kelompok-kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik (Sumarto dalam Aridhayandi, 2018 :889). Berikut dijelaskan *governance stakeholders* yang dikelompokkan menjadi 3 kategori:

- a. Negara atau pemerintah

Konsepsi kepemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan-kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani. Peran pemerintah melalui kebijakan publiknya sangat penting

penyimpangan yang terjadi di dalam pasar dapat dihindari. Dalam kaitannya dengan bidang pendidikan, pemerintah dan dinas-dinas yang berkaitan seperti dinas pendidikan. Negara sebagai salah satu unsur *governance*, di dalamnya termasuk lembaga politik dan lembaga sektor publik. Peran pemerintah melalui kebijakan publiknya sangat penting dalam memfasilitasi terjadinya mekanisme pasar yang benar sehingga penyimpangan yang terjadi di dalam pasar dapat dihindari. Beberapa fungsi negara antara lain meliputi :

- 1) Menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil
- 2) Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan
- 3) Menyediakan public service yang efektif dan accountable
- 4) Menegakkan HAM
- 5) Melindungi lingkungan hidup
- 6) Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik

b. Sektor swasta

Pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: industri pengolahan perdagangan, perbankan, koperasi termasuk kegiatan sektor informal. Dalam bidang pendidikan, sektor swasta meliputi yayasan-yayasan yang mengelola sekolah swasta.

Beberapa fungsi sektor swasta meliputi :

- 1) Menjalankan industri
- 2) Menciptakan lapangan kerja
- 3) Menyediakan insentif bagi karyawan
- 4) Meningkatkan standar hidup masyarakat
- 5) Memelihara lingkungan hidup
- 6) Menaati peraturan
- 7) Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat
- 8) Menyediakan kredit bagi pengembangan UKM

c. Masyarakat madani

Kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau di tengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun

kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi. Dalam bidang pendidikan ada yang dinamakan Dewan Pendidikan yang merupakan lembaga *independent* yang memiliki posisi sejajar dengan Bupati/ Walikota dan DPRD. *Good governance* memungkinkan adanya kesejajaran peran antara ketiga aktor di atas. Sebagaimana dalam pengembangan kapasitas *good governance*, ada yang disebut dengan perubahan dalam distribusi kewenangan yaitu telah terjadi distribusi kewenangan yang tadinya menumpuk di pusat untuk didesentralisasikan kepada daerah, masyarakat, asosiasi dan berbagai kelembagaan yang ada di masyarakat. Artinya saat ini pemerintah bukanlah satu-satunya aktor dalam pengambilan keputusan, masyarakat dan juga pihak swasta pun berkesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Beberapa fungsi dari masyarakat madani meliputi :

- 1) Menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi
- 2) Mempengaruhi kebijakan publik
- 3) Sebagai sarana check and balance pemerintah
- 4) Mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah
- 5) Mengembangkan SDM
- 6) Sarana berkomunikasi antara anggota masyarakat.

3.1.3 Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah sebagai unsur utamapenyelenggara pemerintahan yang merupakan pengayom dan pelayan masyarakat sudah seharusnya menjunjung tinggi Asas Umum Pemerintahan Negara yang Baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan nepotisme (UU No. 28/1999). Dalam Pasal 1 ayat (6) UU No. 28/1999 dijelaskan bahwa “Asas Umum Pemerintahan Negara yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatuhan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme”.

Asas Umum Pemerintahan yang baik ini lebih mengikat secara moral karena asas-asastersebut belum pernah dituangkan secara resmi dalam peraturan perundang-undangan sebagai asas-asas umum pemerintahan, sehingga kekuatan hukumnyasecara yuridis formal belum ada.Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik inidiuraikan oleh Koentjoro Purbopranoto ke dalam tiga belas asas yaitu:

- a. Azas kepastian hukum (*Principle of Legal Security*).
- b. Azas keseimbangan (*Principle of Proportionality*).
- c. Azas kesamaan dalam mengambil keputusan (*Principle of Equality*).
- d. Azas bertindak cermat (*Principle of Carefulness*).
- e. Azas motivasi untuk setiap keputusan (*Principle of Motivation*).
- f. Azas jangan mencampur-adukkan kewenangan (*Principle of Non Misuse of Competence*).
- g. Azas permainan yang layak (*Principle of Fair Play*).
- h. Azas keadilan atau kewajaran (*Principle of Reasonable or Prohibition of Arbitrariness*).
- i. Azas menanggapi pengharapan yang wajar (*Principle of Meeting RaisedExpectation*).
- j. Azas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal (*Principle of UndoingThe Consequences of An Annulled Decision*).
- k. Azas perlindungan atas pandangan (cara) hidup pribadi (*Principle of Protecting The Personal Way of Life*).
- l. Azas kebijaksanaan (*Sapientia*).
- m. Azas penyelenggaraan kepentingan umum (*Principle of Public Service*).

3.1.4 Karakteristik good governance

United Nations Development Programme (UNDP) sebagaimana yangdikutip oleh Lembaga Administrasi Negara mengajukan karakteristik goodgovernance, sebagai berikut:

- a. *Participation*
Setiap warga Negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi

seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

- b. *Rule of Law*
Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia.
- c. *Transparancy*
Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.
- d. *Responsiveness*
Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap “stakeholders”
- e. *Consensus Orientation*
Good Governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan-pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedurprosedur.
- f. *Equity*
Semua warga Negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka
- g. *Effectiveness and Efficiency*
Proses-proses dan lembaga-lembaga sebaik mungkin menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia.
- h. *Accountability*
Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga “stakeholders”. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.
- i. *Strategic Vision*
Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke

depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

3.1.5 Pilar Good Governance

Dari sini terlihat bahwa *good governance* tidaklah terbatas pada bagaimana pemerintah menjalankan wewenangnya dengan baik semata, tetapi lebih penting lagi adalah bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dan mengontrol pemerintah untuk menjalankan wewenang tersebut dengan baik (*accountable*). Karenanya, seringkali tata pemerintahan yang baik dipandang sebagai “sebuah bangunan dengan 3 tiang”. Ketiga tiang penyangga itu adalah transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

1. Transparansi

Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait, seperti berbagai peraturan dan perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah dengan biaya yang minimal. Informasi sosial, ekonomi, dan politik yang andal (*reliable*) dan berkala haruslah tersedia dan dapat diakses oleh publik (biasanya melalui filter media massa yang bertanggung jawab). Artinya, transparansi dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan (untuk kemudian) dapat dipantau.

Transparansi jelas mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik. Sebab, penyebaran berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada berbagai komponen masyarakat untuk turut mengambil keputusan. Oleh karenanya, perlu dicatat bahwa informasi ini bukan sekedar tersedia, tapi jugarelevan dan bisa dipahami publik. Selain itu, transparansi ini dapat membantu untukmempersempit peluang korupsi di kalangan para pejabat publik dengan “terlihatnya”segala proses pengambilan keputusan oleh masyarakat luas.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas atau *accountability* adalah kapasitas suatu instansi pemerintahan untuk bertanggung gugat atas keberhasilan maupun kegagalannya dalam melaksanakan misinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan secara periodik. Artinya, setiap instansi pemerintah mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian organisasinya dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya, mulai dari tahap perencanaan, implementasi, sampai pada pemantauan dan evaluasi.

Akuntabilitas merupakan kunci untuk memastikan bahwa kekuasaan itu dijalankan dengan baik dan sesuai dengan kepentingan publik. Untuk itu, akuntabilitas mensyaratkan kejelasan tentang siapa yang bertanggung gugat, kepada siapa, dan apa yang dipertanggungjawabkan. Karenanya, akuntabilitas bisa berarti pula penetapan sejumlah kriteria dan indikator untuk mengukur kinerja instansi pemerintah, serta mekanisme yang dapat mengontrol dan memastikan tercapainya berbagai standar tersebut.

Berbeda dengan akuntabilitas dalam sektor swasta yang bersifat *dual-accountability structure* (kepada pemegang saham dan konsumen), akuntabilitas pada sektor publik bersifat *multiple-accountability structure*. Ia dimintai pertanggungjawaban oleh lebih banyak pihak yang mewakili pluralisme masyarakat. Rincinya, kinerja suatu instansi pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap atasan, anggota DPRD, organisasi nonpemerintah, lembaga donor, dan komponen masyarakat lainnya. Semua itu berarti pula, akuntabilitas internal (administratif) dan eksternal ini menjadi sama pentingnya. Akhirnya, akuntabilitas menuntut adanya kepastian hukum yang merupakan resultandari hukum dan perundangan-undangan yang jelas, tegas, diketahui publik di satu pihak, serta upaya penegakan hukum yang efektif, konsisten, dan tanpa pandang bulu di pihak lain. Kepastian hukum juga merupakan indikator penting dalam menimbang tingkat kewibawaan suatu pemerintahan, legitimasinya di hadapan rakyatnya, dan dunia internasional.

3. Partisipasi

Partisipasi merupakan perwujudan dari berubahnya paradigma mengenai peran masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat bukanlah sekedar penerima manfaat (*beneficiaries*) atau objek belaka, melainkan agen pembangunan (subjek) yang mempunyai porsi yang penting. Dengan prinsip “dari dan untuk rakyat”, mereka harus memiliki akses pada pelbagai institusi yang mempromosikan pembangunan. Karenanya, kualitas hubungan antara pemerintah dengan warga yang dilayani dan dilindunginya menjadi penting di sini. Hubungan yang pertama mewujud lewat proses suatu pemerintahan dipilih. Pemilihan anggota legislatif dan pimpinan eksekutif yang bebas dan jujur merupakan kondisi inisial yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa hubungan antara pemerintah yang diberi mandat untuk menjadi “*dirigen*” tata pemerintahan ini dengan masyarakat (yang diwakili legislatif) dapat berlangsung dengan baik.

Pola hubungan yang kedua adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Kehadiran tiga domain pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam proses ini amat penting untuk memastikan bahwa proses “pembangunan” tersebut dapat memberikan manfaat yang terbesar atau “kebebasan” (mengutip Amartya Sen) bagi masyarakatnya. Pemerintah menciptakan lingkungan politik, ekonomi, dan hukum yang kondusif. Sektor swasta menciptakan kesempatan kerja yang implikasinya meningkatkan peluang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Akan halnya masyarakat sipil (lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, koperasi, serikat pekerja, dan sebagainya) memfasilitasi interaksi sosial-politik untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas ekonomi, sosial, dan politik.

Sementara itu, di tingkat praktis, partisipasi dibutuhkan untuk mendapatkan informasi yang andal dari sumber pertama, serta untuk mengimplementasikan pemantauan atas implementasi kebijakan pemerintah, yang akan meningkatkan “rasa memiliki” dan kualitas implementasi kebijakan tersebut.

Di tingkatan yang berbeda, efektivitas suatu kebijakan dalam pembangunan mensyaratkan adanya dukungan yang luas dan kerja sama dari semua pelaku (*stakeholders*) yang terlibat dan memiliki kepentingan.

3.1.6 Konsep Pelayanan Publik

Publik adalah masyarakat umum itu sendiri, yang selayaknya diurus, diatur dan dilayani oleh pemerintah sebagai administrator tetapi juga sekaligus kadang-kadang bertindak sebagai penguasa dalam pengaturan hukum tata negaranya. (Kencana Inu, 1999). Pelayanan Publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan Umum oleh Lembaga Administrasi Negara (1998) diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, di daerah, dan di lingkungan badan usaha milik negara/daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemerintah daerah sebagai penyelenggara utama pelayanan publik untuk melayani kebutuhan publik yang lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan demokratis.

Negara-negara maju di Eropa dan Amerika dalam penyelenggaraan pelayanan publik terkini sudah mengacu pada paradigma pelayanan publik "*New Public Service*", sebagai paradigma pelayanan publik yang ideal. Dalam paradigma NPM, administrasi publik lebih menekankan peran serta masyarakat dan sektor publik menuju manajemen pelayanan publik yang lebih propasar, sehingga menjadi pergeseran dari kebijakan dan administrasi menuju manajemen

dengan mengadopsi manajemen sektor privat. Dalam perspektif ini praktek pelayanan publik berdasarkan pertimbangan ekonomi yang rasional. Kebutuhan dan kepentingan publik dirumuskan sebagai agregasi dari kepentingan-kepentingan publik. Publik diposisikan sebagai pelanggan (*customers*) sedangkan pemerintah berperan mengarahkan (*steering*) pasar. Dalam perkembangannya konsep ini diterjemahkan bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas maka diperlukan standar pelayanan untuk menjamin kualitas pelayanan publik (Widiyarta, 2012 : 4).

Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karenanya birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang baik dan profesional.

3.2 Rangkuman

1. Berkembangnya istilah *governance* dan *good governance* berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan dalam suatu negara. Secara umum, *governance* adalah proses pembuatan keputusan dan proses bagaimana keputusan diimplementasikan diberbagai tingkat pemerintahan.
2. Terdapat tiga teori yang menjadi kunci dalam pembahasan mengenai konsep *good governance* yaitu *Pertama*, Teori *Political Society* yang mencakup (masyarakat politik : partai politik, birokrasi, negara). *Kedua*, Teori *Economic Society* (masyarakat ekonomi). *Ketiga*, Teori *Civil Society* (masyarakat sipil/ masyarakat madani)
3. *Good governance* atau tata pemerintahan yang baik seringkali dipandang sebagai sebuah bangunan dengan 3 tiang. Ketiga tiang penyangga itu adalah transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

Berikut disajikan gambar dari prinsip *good governance* :



Gambar 3.1 Prinsip Good Governance

3.3 Tugas/Latihan/Eksperimen

1. Menurut saudara, bagaimana konsep penerapan good governance?
2. Berikan gambaran daerah yang berhasil menerapkan prinsip good governance dalam aspek ekologi pemerintahan?
3. Bagaimana pengaruh ekologi pemerintahan dalam perwujudan good governance?

3.4 Rujukan

Aridhayandi, Rendi, M. 2018. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. No. 4 (2018): 883-902

- Agus Widiyarta, 2012, Pelayanan Kesehatan Dari Perspektif Participatory Governance (Studi Kasus Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Dasar Kesehatan di Kota Surabaya), Disertasi Program Doktor Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi, Malang: Universitas Brawijaya.
- Mariana, D., Paskalina, C., & Yuningsih, N. Y. (2007). Perbandingan Pemerintahan. Jakarta: Universitas Terbuka
- Sarundajang, S. H. (2012). Babak Baru Sistem Pemerintahan. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- Syafiie, I. K. (2011). Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: PT. Refika Aditama

BAB IV. **MEMBANGUN PEMERINTAH YANG EKOLOGIS DAN BERKELANJUTAN SEBAGAI WUJUD DARI *GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE***

4.1 Pendahuluan

Environmental governance merupakan interaksi dengan lingkungan hidup kita kelola dengan bingkai konseptual. Environmental governance adalah pada keperluan untuk memahami dan mengelola hubungan timbal balik antara sistem sosial dengan ekosistem, lebih dari itu pengeloaan sistem sosial perlu dikelola dengan mengedepankan nilai-nilai ekologis, dan sebaliknya ketahanan ekosistem bias dipelihara melalui pengelolaan sistem sosial yang terbimbing oleh kaidah-kaidah ekologis.

Penyenggaraan tata pemerintahan memberikan dampak secara langsung terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan menjunjung prinsip-prinsip good governance akan membawa implikasi terjadinya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang baik pula. Sebaliknya, penyelenggaraan pemerintahan yang buruk (bad governance) pada akhirnya akan membawa pengaruh bagi pengelolaan lingkungan hidup yang tidak baik. Konsep good ataupun bad pada dasarnya

adalah persoalan keberpihakan pada nilai-nilai tertentu. Dengan kata lain, pengelolaan lingkungan hidup yang baik sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh tata pemerintahan yang baik di bidang lingkungan hidup (good environmental governance).

Buku ajar ini akan menjelaskan tentang konsep Good Environmental Governance. Secara lengkap buku ajar pada bab 4 ini menjelaskan tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Konsep good environmental governance
2. Konsep Pembangunan Berkelanjutan
3. Pembangunan Berkelanjutan dilihat dari Aspek Ekologis

Setelah mempelajari buku ajar ekologi pemerintahan ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Memahami konsep good environmental governance secara seksama
2. Memahami konsep pembangunan berkelanjutan
3. Memahami konsep Pembangunan Berkelanjutan dilihat dari Aspek Ekologis

4.2 Penyajian

4.2.1 Pembangunan Berkelanjutan dilihat dari Aspek Ekologis

Menurut Sujatini (2018 : 29) bahwa aspek penting pada proses pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) adalah aspek ekologi, tujuannya adalah menjamin ketersediaan sumberdaya alam yang selalu cukup, baik untuk sekarang maupun nantinya. Ketersediaan sumberdaya alam terkait dengan daya dukung lingkungan yang akan mempengaruhi berjalannya proses pembangunan, sehingga SDGs menjadikan ekologi sebagai pilar utama dibanding pilar yang lainnya. Suatu (proses) pembangunan mempengaruhi sistem ekologi demikian jugasebaliknya, pembangunan dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan hidup.

Pembangunan berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menjadi tujuan PBB merupakan tindak lanjut dari MDGs. Sebagai upaya untuk menindaklanjuti tujuan MDGs tahun 2015

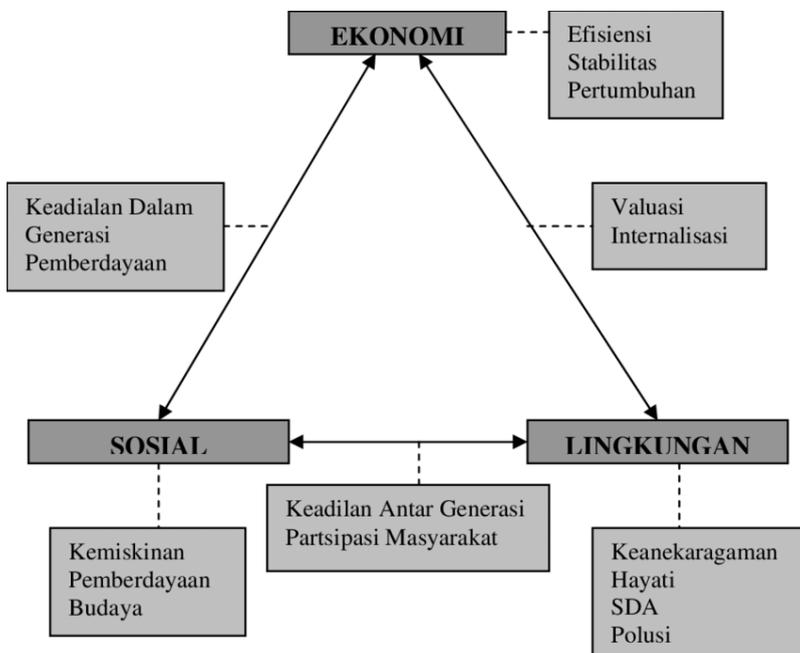
yang masih belum tuntas yaitu memberantas kemiskinan, maka PBB merumuskan agenda SDGs dengan perhatian yang lebih pada keseimbangan lingkungan. Di Indonesia agenda SDGs saat ini sedang berusaha untuk mengatasi krisis sosial ekologis, hal ini dapat dicermati bahwa krisis sosial-ekologi yang terjadi di Indonesia adalah akibat dari pembangunan yang masih bertumpu pada cara pikir antroposentris yang menjadikan alam sebagai target sasaran untuk dieksploitasi sedangkan paradigma pembangunan yang berdimensi ekosentrik dimana hubungan antara subyek dan obyek pembangunan bersifat ko-eksistensi masih belum diterapkan sepenuhnya meskipun konsep pembangunan berkelanjutan sudah disosialisasikan dimana mana.

Menurut Shaliza dalam Sujatini (2018 :30) menyatakan bahwa pembangunan yang berkelanjutan dapat dipahami melalui kelembagaan yang ada. Kelembagaan diartikan sebagai:

- a. Sistem yang berfungsi dalam hubungan pada lingkungan mereka,
- b. Mengorganisasi dan mengatur entitas dimana harus ada kesesuaian antara struktur organisasi dan prosedurnya dengan tugas-tugas, produk-produk, orang, sumberdaya dan konteks yang mereka hadapi dan
- c. Memperhatikan lingkungan secara baik beserta perubahan sumberdaya, yang terkait juga dengan politik dan ekonomi untuk menciptakan pola kekuasaan dan insentif.

Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan dimaknai sebagai keberlanjutan dan kemandirian pembangunan yang bergantung pada kekuatan dan kualitas institusi yang ada. Pembangunan yang berkelanjutan secara ekologi dipahami sebagai usaha untuk memanfaatkan dan mengelola sumberdaya alam secara berurusan lingkungan dan berlaku adil kepada generasi yang akan datang (Keraf, 2002).

Dalam istilah pembangunan berkelanjutan, ketiga pilar dari pembangunan berkelanjutan sangat populer diperbincangkan. Berikut disajikan tiga pilar pembangunan berkelanjutan :



Gambar 4.1 Pilar Pembangunan Berkelanjutan

Berdasarkan ketiga dimensi masyarakat berkelanjutan dapat diilustrasikan dalam tiga pilar pembangunan berkelanjutan.

1. Ekologis berhubungan dengan ekosistem yang terjaga serta berfungsi dengan baik dengan keanekaragaman hayati yang banyak jumlahnya sebuah landasan ekologis yang membentuk dasar dari segalanya. Adalah sangat penting untuk melestarikan proses ekologis alam dalam jangka panjang yang pada akhirnya menciptakan jaminan masa depan umat manusia. Alam memberikan kita serangkaian layanan gratis, seperti pemurnian air secara alami, menyaring radiasi sinar ultra violet, dan penyerbukan oleh serangga. Segala sesuatu yang ada di alam dapat dibenarkan. Aspek ekologis membentuk kerangka kerja bagian paling luar untuk seluruh kegiatan umat manusia.
2. Sosial berhubungan dengan dimensi manusia bahwa kita hidup dalam lingkaran masyarakat lokal dan global dalam hubungan yang saling bergantung satu sama lain dan berbagi secara sama dan adil atas beragam sumber daya alam dengan cara yang

demokratis. Singkatnya, membangun sebuah masyarakat dimana keperluan dasar kita terpenuhi dan hak asasi manusia dihormati. Aspek sosial adalah mempertahankan secara konstan serta menciptakan sebuah kehidupan yang baik.

3. Ekonomi menjelaskan aspek penting perawatan berhati-hati dengan beragam sumber daya yang kita miliki, manusia dan materi. Sebuah ekonomi yang menggunakan hasil bunga bank daripada modal. Sebuah pembangunan ekonomi yang berarti keuntungan-keuntungan ekonomi untuk masyarakat secara keseluruhan dan tidak mengandung ancaman terhadap modal buatan dan alami. Ekonomi yang tidak adil secara sosial atau tidak berhubungan dengan kerangka ekologis adalah tidak berkelanjutan. Dengan kata lain, bertindak secara berkelanjutan membuat ekonomi memiliki arti. WWF dalam melakukan kegiatannya berdasarkan pada beragam isu ekologi dan melibatkan dimensi sosial dan ekonomi dalam setiap upaya konservasi alam yang dilakukannya.

Upaya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan ekologis dibutuhkan *good environmental governance* yaitu tata pemerintahan yang baik dalam pengelolaan sumber daya lingkungan. Menurut Shaliza dalam Sujatini (2018 : 30) menjelaskan *good environmental governance* sebagai pelaksanaan kewenangan (politik, ekonomi dan administrasi) yang mampu mengelola sumber daya dan masalah-masalah bangsa (masalah publik) secara efektif dan efisien, sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, dituntut adanya iklim demokrasi dalam pemerintahan, untuk mengelola sumber daya alam dan masalah-masalah publik yang didasarkan pada keterlibatan masyarakat, akuntabilitas dan transparansi. *Good environmental governance* juga dapat diartikan pemerintah mempunyai visi keberlanjutan dan perlindungan terhadap daya dukung ekosistem, *good environmental governance* merupakan penggabungan antara elemen *good governance* dengan aspek keberlanjutan ekologis.

Good environmental governance dimaknai sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang peduli terhadap

kelangsungan dan kelestarian lingkungan hidup. Pentingnya pemerintahan yang baik, oleh karena penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan menentukan sejauh mana tujuan penyelenggaraan pemerintahan itu bisa tercapai. Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip *good environmental governance* memberikan makna bahwa pengelolaan urusan pemerintahan di bidang sumberdaya alam dan lingkungan diselenggarakan sedemikian rupa dengan dilandasi visi perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip *good governance* berarti mendemokraskan penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan dengan melibatkan kalangan swasta dan masyarakat. Aspek demokrasi ini mencegah dominasi salah satu pihak (utamanya pemerintah) terhadap pihak lain dalam pengelolaan kepentingan publik, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Praktik pemerintahan masa lalu, yang mengabaikan prinsip-prinsip *good governance* telah mendatangkan berbagai kerusakan lingkungan, seperti penggundulan hutan, bencana banjir, maraknya illegal logging, dan lain-lain. Praktik pemerintahan di masa lalu, di satu sisi menutup pintu bagi adanya kontrol terhadap jalannya pemerintahan, dan pada sisi lain tidak transparan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip *good environmental governance* memberikan makna bahwa pengelolaan urusan pemerintahan di bidang sumberdaya alam dan lingkungan diselenggarakan sedemikian rupa dengan dilandasi visi perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Sonny Kerap menegaskan bahwa ada hubungan erat antara penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan mempengaruhi dan menentukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik mencerminkan tingkat penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tanpa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sulit mengharapkan akan adanya pengelolaan lingkungan hidup yang baik.

Hyronimus Rhati dalam Nopyandri (2014 : 91) berpendapat bahwa *good governance* yang berkaitan dengan aspek pengelolaan lingkungan itu, juga berkaitan dengan pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Menurut Hyronimus, dari 13 (tiga belas) asas umum pemerintahan yang baik, yang berkaitan dengan urusan lingkungan hidup antara lain asas kepastian hukum, keseimbangan, tidak mencampuradukkan kewenangan, keadilan dan kewajaran, menanggapi harapan yang ditimbulkan, dan asas penyelenggaraan kepentingan umum. Keterkaitan antara penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan masalah pengelolaan lingkungan hidup yang mengambil contoh berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru, yang disebabkan pemerintahan tidak memiliki *good governance*.

Terciptanya *good governance* merupakan prasyarat pokok dari pengelolaan lingkungan hidup yang efektif karena pengelolaan lingkungan hidup yang efektif tergantung pada berfungsinya sistem politik yang menjamin demokrasi dan *rule of law*. Namun demikian pemerintah yang sudah mampu mewujudkan *good governance* belum tentu memiliki keperdulian terhadap aspek keberlanjutan ekosistem. Ketidakperdulian ini akan sangat berpengaruh terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah yang diambilnya, khususnya yang menyangkut pengelolaan sumber daya alam. Oleh sebab itu pemerintah yang telah mengupayakan terwujudnya *good governance* masih memerlukan persyaratan tambahan yaitu upaya mengaitkan seluruh kebijaksanaan pembangunan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan ekologis (*ecological sustainability*). Dengan kata lain, pengelolaan lingkungan hidup yang baik sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh tata pemerintahan yang baik di bidang lingkungan hidup (*good environmental governance*).

4.2.2 Menumbuhkan kecerdasaran Ekologis

Berbagai penjelasan yang telah dipaparkan pada bab dan paragraf sebelumnya diharapkan dapat membangkitkan kesadaran para pembaca mengenai pentingnya menjaga kelestarian bumi tempat

kita semua tinggal. Kesadaran tersebut dapat dinamakan kesadaran ekologis. Kesadaran tersebut terutama harus dimiliki oleh para politisi dan pejabat pemerintah yang akan membuat dan melaksanakan kebijakan publik. Kesadaran ekologis tersebut harus pula dimiliki oleh para penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa, dan terutama hakim, agar para penghancur bumi yang hanya mengejar keuntungan sesaat dapat dihukum berat sehingga menimbulkan efek jera.

Kesadaran ekologis harus pula dimiliki oleh para pebisnis, karena merekalah yang bekerja mengubah sumber daya alam menjadi produk-produk industri yang mendatangkan keuntungan. Selama ini merekalah pelaku utama penghancur bumi karena pikirannya dipenuhi dengan kerakusan untuk memperoleh keuntungan setinggi-tingginya tanpa memedulikan kelestarian lingkungan. Perilaku jahat menghancurkan bumi dari para pengusaha semacam itu memperoleh dukungan dari politisi busuk, birokrasi bandit, serta penegak hukum yang korup. Contoh-contoh nyata mengenai hal ini dapat dilihat di berbagai daerah pertambangan. Kekayaan bumi dikeduk dengan semena-mena tanpa adanya reklamasi yang memadai, yang pada akhirnya mewariskan sumber bencana pada anak cucu. Hal yang sama terjadi pada kawasan-kawasan industri yang menghasilkan polutan sangat tinggi tanpa ada upaya pencegahan yang memadai, meskipun undang-undang telah mengaturnya. (Wasistiono, 2013:1950

1. *The first principle, companies, should play a major role in cleaning up the environment;*
2. *The second principle, the business sector should respect the opinions of the enviromental sector;*
3. *The third principle, the development of “greenfields (greenbelts)” and “brownfields” (wastelands).*

Penjelasan selanjutnya mengenai prinsip di atas yakni sebagai berikut. Prinsip pertama, pemerintah memiliki kemampuan untuk membuat aturan, tetapi masyarakat tidak dapat menduga apa yang akan dikerjakan selanjutnya, sebaliknya ahli-ahli lingkungan hidup hanya dapat menyuarakan pandangan-pandangannya. Apabila sistem berjalan seperti Iri, kita semua tidak dapat menyelamatkan bumi. Oleh karena itu, berbagai perusahaan perlu bekerja secara

sungguh-sungguh untuk menciptakan masyarakat ekonomi yang melindungi lingkungan.

Prinsip kedua, lebih ditujukan pada sektor bisnis, yang menegaskan perlunya perusahaan yang bergerak mencari keuntungan memerhatikan berbagai usulan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan serta memanfaatkan usulan tersebut untuk sekaligus membuka peluang bisnis.

Prinsip ketiga, bahwa sejak revolusi industri, berbagai perusahaan telah membuat “lapangan hijau” dan atau “sabuk hijau” dalam pembangunan pabrik, kompleks perkantoran, ataupun kompleks permukiman. Selain itu, perusahaan perlu menaruh perhatian yang sungguh-sungguh terhadap limbah yang dihasilkan oleh aktivitas usaha mencari keuntungan agar tidak mencemari lingkungan.

Kesadaran ekologis harus pula dimiliki masyarakat luas, sebab merekalah sebenarnya pemilik kedaulatan. Tanpa adanya rasa memiliki bumi dari masyarakat luas, maka kontrol sosial terhadap para penyelenggara negara akan menjadi lemah. Masuk dalam kategori ini adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup. Merekalah yang selama ini menjadi pendekar penyelamat lingkungan hidup, manakala para penyelenggara negara.

Upaya untuk mewujudkan manifestasi kesadaran ekologi adalah sebagai berikut:

1. Tidak Bersikap Apatis Terhadap Alam, Sikap apatis merupakan suatu sikap masa bodoh atau sikap acuh tak acuh terhadap alam. Sikap apatis terhadap alam ini akan sangat mengat menentukan keberlangsungan hidup dimasa depan. Karena, alam yang selalu disadari oleh orang-orang yang mempunyai hati untuk meresa, mempunyai mata untuk melihat, dan mempunyai mata untuk mendengar akan membawa manusia kepada kesadaran akan pentingnya menjaga, memelihara, dan melestarikan alam.
2. Tidak Membuat Kerusakan, Kerusakan alam disebabkan karena manusia yang diamanahkan tidak menjalankan amanahnya secara baik dan benar. Padahal, salah satu tugas dari manusia adalah mengelola, memelihara, dan memakmurkan bumi.

3. Cerdas dan Berkemajuan dalam Pengelolaan Alam, R. M. Gatot P. Soemartono dalam bukunya, Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia, menuliskan bahwa, pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia khususnya atau bahkan dunia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Pengertian pembangunan berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana dalam menggunakan dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana dalam pembangunan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup
4. Memanfaatkan Alam Seperlunya. Manusia yang bijaksana terhadap alam adalah manusia yang memanfaatkan alam seperlunya atau tidak berlebihan dalam menggunakannya. Memanfaatkan alam seperlunya ini sangat dibutuhkan karena mengingat bahwa, khalifahdilarang melakukan usaha-usaha dan tindakan-tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan alam. Termasuk lingkungan alam hayati, seperti hewan-hewan, pepohonan, maupun lingkungan fisik dan abiotik termasuk air laut, udara, sungai, dan sebagainya.

4.3 Rangkuman

1. Upaya untuk mewujudkan pembangunanberkelanjutan ekologis dibutuhkan *good environmental governance* yaitu tatapemerintahan yang baik dalam pengelolaansumberdaya lingkungan
2. *Good environmental governance* juga dapat diartikan pemerintah mempunyai visi keberlanjutan danperlindungan terhadap daya dukungekosistem, *good environmental governance* merupakan penggabungan antara elemengood governance dengan aspek keberlanjutan ekologis.

4.4 Tugas/Latihan/Eksperimen

1. Membuat jurnal terkait ekologi pemerintahan

4.5 Rujukan

- Hyronimus Rhiti, 2005, Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Nopyandri. 2014. Penerapan Prinsip Good Enviromental Governance Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jurnal Ilmu Hukum
- Keraf, A. S. 2002. *Etika lingkungan*, Jakarta : Kompas
- Sujatini, S. 2018. Keberlanjutan Ekologis: Proses Pembangunan Kawasan Hunian sebagai SustainableDevelopment Goals (Sdgs) (Studi kasus proses pembangunan kawasan hunian pada kota mandiri) *Jurnal Ikraith-Teknologi*, VOL. 2, NO. 2, JULI 2018.
- <http://pustakasumatera.org/tentang-esd/3-pilar-pembangunan-berkelanjutan.html>

